



KAJIAN POLITIK EKONOMI PELESTARIAN TINGGALAN MAJAPAHIT DI KAWASAN TROWULAN

Sebagai satu-satunya peninggalan kota masa Kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, Trowulan menyimpan banyak potensi dan daya tarik. Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada kemunculan berbagai kelompok kepentingan. Masyarakat, pemerintah, akademisi, dan swasta melibatkan diri dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai *stakeholder*, hadir dengan membawa berbagai pandangan, pemikiran, dan sikap yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu dapat menimbulkan potensi konflik atau sebaliknya menciptakan suatu kerjasama antar *stakeholder*.

Trowulan merupakan sebuah kawasan karena terdiri dari berbagai situs. Setiap kasus pemanfaatan pada situs, tidak memperlihatkan kekuasaan tunggal yang hanya dimiliki oleh satu *stakeholder*. Setiap situs cenderung memiliki *stakeholder* dominan yang berlainan dan pada akhirnya menciptakan kompleksitas dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Saat ini, Trowulan merupakan ruang terbuka, ruang pertemuan dan kontestasi antara *stakeholder*. Manajemen yang baik dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan dapat, terwujud apabila ada sinergi diantara mereka.

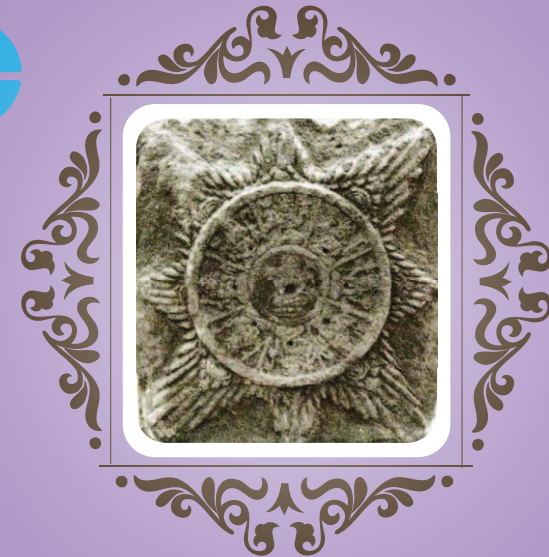
ISBN 978-602-221-162-4



9 786022 211624



KAJIAN POLITIK EKONOMI PELESTARIAN TINGGALAN MAJAPAHIT DI KAWASAN TROWULAN



KAJIAN POLITIK EKONOMI PELESTARIAN TINGGALAN MAJAPAHIT DI KAWASAN TROWULAN

Sugih Biantoro
Endang Turmudi

=====**KATA PENGANTAR**=====

Kegiatan penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pelestarian Tinggalan Majapahit di Kawasan Trowulan” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan di Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan salah satu bagian dari kegiatan penelitian payung “Kajian Politik Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya” yang akan dilaksanakan selama tiga tahun (tahun 2012 hingga 2014).

Buku ini berisi uraian dan analisis dari hasil kegiatan penelitian tim pada tahun pertama (2012), yang memberikan penjelasan terkait fokus penelitian tahun pertama yaitu identifikasi *stakeholder*, dengan lingkup meliputi: pertama, pengetahuan cara berpikir kelompok-kelompok *stakeholder* yang terlibat dengan mempertimbangkan latar belakang mereka. Kedua, hubungan yang terbentuk di antara kelompok-kelompok kepentingan. Ketiga, kategorisasi dan hirarki kekuasaan kelompok-kelompok tersebut. Pada bagian awal terdapat paparan dengan nuansa historis untuk menjelaskan penemuan Trowulan dari masa kolonial hingga saat ini. Sedikit banyak akan terlihat awal kemunculan *stakeholder* di Trowulan berikut dengan pola pikir mereka dalam memaknai Trowulan.

Besar harapan Kami, buku ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan keterlibatan *stakeholder* dalam upaya pelestarian dan pengelolaan warisa budaya di Trowulan. Selain itu, Kami juga mengharapkan hasil kajian dalam buku ini dapat menjadi masukan bagi

penyusunan kebijakan kebudayaan nasional, khususnya rencana pemerintah untuk membentuk badan pengelola warisan budaya.

Jakarta, Desember 2012

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. Endang Turmudi, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Telaah Konsep	5
C. Tujuan dan Metode Penelitian	11
BAB II TROWULAN: SAKSI PERADABAN MAJAPAHIT	13
A. Majapahit Sebagai Kerajaan Besar di Nusantara	13
B. Trowulan Sebagai Warisan Budaya	17
1. Trowulan: Dari Situs Menjadi Kota	17
2. Trowulan: Bukti-Bukti Peninggalan Majapahit dan Nilai Pentingnya	21
BAB III PEMAKNAAN TROWULAN “MASA LALU DAN MASA KINI”	27
A. Masa Kolonial – Kemerdekaan	27
B. Pasca Kemerdekaan – 1999	32
C. Masa 1999 – Sekarang	39
BAB IV STAKEHOLDER DI TROWULAN	41
A. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	41
1. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan-Jawa Timur	41
2. Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas)	43
3. Balai Arkeologi (Balar) di Yogyakarta	43
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur	44
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto	44
6. Pengrajin Lokal	44

7.	Pengrajin/Pembuat Bata	46
8.	Pedagang Kecil	47
9.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	47
10.	Yayasan Lumbini	47
11.	Yayasan Bina Trowulan	47
12.	Kelompok Kesenian	48
13.	Masyarakat Umum	48
14.	Masyarakat Islam (NU)	49
15.	Masyarakat Kepercayaan	49
16.	Perguruan Tinggi	49
17.	Media	50
18.	Pemburu Harta Karun	50
19.	Pihak Swasta	50
B.	Hubungan antara <i>Stakeholder</i>	50
1.	Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat.....	51
2.	Pemanfaatan di Komplek Makam Troloyo, Putri Campa, dan Siti Hinggil.....	54
3.	Pembangunan Wihara Majapahit	63
4.	Pembangunan Pura Majapahit.....	65
5.	Pembangunan Pusat Informasi Majapahit.....	68
C.	Kategori dan Hirarki <i>Stakeholder</i>	71
BAB V PENUTUP.....		79
DAFTAR PUSTAKA		81

BAB I

PENDAHULUAN

The cultural heritage may be defined as the entire corpus of material signs - either artistic or symbolic - handed on by the past to each culture and, therefore, to the whole of humankind. As a constituent part of the affirmation and enrichment of cultural identities, as a legacy belonging to all humankind, the cultural heritage gives each particular place its recognizable features and is the storehouse of human experience. The preservation and the presentation of the cultural heritage are therefore a corner-stone of any cultural policy. (UNESCO)

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada pengertian dari UNESCO, warisan budaya merupakan bagian konstituen pengayaan identitas budaya sebagai warisan milik seluruh umat manusia. Warisan budaya adalah peninggalan berupa artefak dalam bentuk fisik dan tak berwujud dari kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari generasi masa lalu, dipertahankan di masa sekarang dan diberikan untuk kepentingan generasi mendatang.¹ Di Indonesia, hal yang berhubungan dengan warisan budaya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sesuai dengan namanya, undang-undang tersebut hanya mengatur warisan budaya yang bersifat kebendaan (cagar budaya), sedangkan warisan budaya yang tidak berwujud (non-benda) belum memiliki payung hukum yang jelas.

Warisan budaya memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat nilai penting tersebut, maka warisan budaya perlu dilestarikan dan dikelola

¹ <http://www.unesco.org>

secara tepat. Dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010, pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan pelestarian, dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Hal itu yang membedakan undang-undang ini dengan undang-undang yang lama, yaitu UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Dalam Undang-undang yang lama, terlihat kecenderungan bahwa pemerintah diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelestarian, sehingga peran serta pihak lain terutama masyarakat terlupakan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia tercantum dalam Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2010. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang terdiri atas unsur pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Mengenai peran dan tanggung jawab yang perlu dijalankan oleh pihak-pihak tersebut belum diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Ketika tulisan ini dibuat, Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan lebih rinci UU No. 11 Tahun 2010 masih dalam proses penyusunan. Padahal batas waktu penyusunan PP seharusnya satu tahun setelah UU disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tidak adanya hukum dalam mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya turut berperan menciptakan ke-tidak kondusif-an situasi di lokasi tempat cagar budaya berada. Masing-masing pihak akan merasa memiliki dan paling berhak untuk mengelola cagar budaya yang bersangkutan. Pada akhirnya, mereka yang memiliki “capital” lebih besar dari yang lain keluar sebagai “pemenang” dan mampu mengontrol pihak-pihak yang “kalah”.

Dari sekian banyaknya cagar budaya di Indonesia, Trowulan merupakan salah satu yang penting untuk diperhatikan secara lebih bijak. Sebagai bagian dari bukti sejarah kebesaran Majapahit di Nusantara, Trowulan sedang menghadapi berbagai persoalan kompleks dalam upaya-upaya pelestarian dan pengelolaannya. Hingga tulisan ini

dibuat, Trowulan belum ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya. Penetapan menjadi penting karena terkait dengan manajemen pelestarian dan pengelolaannya. Sebagai perbandingan adalah Borobudur. Sejak ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya dan warisan budaya dunia oleh UNESCO, Borobudur telah memiliki manajemen pengelolaan yang- walaupun masih ada kekurangan disana- sini- lebih baik daripada Trowulan.

Semenjak hasil-hasil penelitian membuktikan Trowulan sebagai bukti peradaban tinggi Majapahit. Banyak pihak/kelompok yang menaruh kepentingan di Trowulan. Perbedaan kepentingan inilah yang menambah kompleksitas pelestarian dan pengelolaan di kawasan tersebut. Kami melihat bahwa perbedaan kepentingan yang terjadi akibat dari berbagai macam faktor, diantaranya dan -salah satu yang kami soroti- adalah pemahaman atau pemaknaan Trowulan yang berbeda-beda antar pihak-pihak atau kelompok-kelompok.

Pemahaman masyarakat dan pemerintah belum tentu sama, begitu pula pemahaman pemerintah dengan dunia usaha, atau pemahaman masyarakat dengan dunia usaha. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi, pemahaman di kalangan anggota masyarakat sendiri berlainan. Akan tetapi, kompleksitas yang terjadi di Trowulan tidak hanya berbicara masalah pertentangan sumber daya, namun memperlihatkan adanya kerjasama antar pihak-pihak tertentu. Kondisi ini berjalan dengan sendirinya, menandakan adanya situasi yang sepertinya memanfaatkan kelemahan hukum yang ada di Trowulan.

Trowulan telah berubah menjadi arena terbuka bagi setiap kontestasi perebutan sumberdaya. Salah satu jalan keluar dari situasi ini dan memang yang paling banyak diusulkan oleh berbagai pihak selama ini – terutama akademisi – adalah pembentukan badan pengelola.² Melalui badan ini, peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan Trowulan dapat didistribusikan

²Tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 97.

secara seimbang. Kami memang tidak tahu sejauhmana efektifnya badan tersebut, namun kiranya kami perlu mengambil peran tertentu dalam upaya membantu memecahkan persoalan-persoalan yang tengah berlangsung.

Gaung Trowulan telah menyebar kemana-mana. Semakin lama, semakin banyak pihak-pihak yang mengambil peran untuk terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Secara garis besar, kami membagi pihak-pihak atau kelompok-kelompok ke dalam klasifikasi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemetaan terhadap pihak/kelompok tersebut.

Secara sederhana, kami melihat upaya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan Trowulan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengidentifikasi mereka yang terlibat dapat memetakan persoalan lebih mudah. Secara tidak langsung, upaya identifikasi ini dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait pihak-pihak yang akan menduduki badan pengelola.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Lingkup substansi penelitian ini terdiri dari tiga persoalan: *Pertama*, latar belakang dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat. *Kedua*, hubungan atau interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, apakah saling bertentangan atau membentuk semacam kerjasama. *Ketiga*, klasifikasi dan hirarki kekuasaan pihak-pihak yang terlibat. Siapa yang memiliki “capital” dan kuasa lebih besar dari pada yang lain, dan bagaimana proses pengontrolan dapat berjalan.

Tulisan ini adalah hasil dari penelitian tahun pertama dari rangkaian tiga tahun yang direncanakan. Untuk itu, fokus penulisan di tahun pertama ini lebih menitikberatkan pada lingkup substansi *pertama*. Untuk lingkup *kedua* dan *ketiga*, tentang interaksi, klasifikasi dan hirarki kekuasaan akan tetap disampaikan walau sifatnya masih mendasar. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah “ekonomi-politik” dengan diperkaya berbagai studi seperti sejarah,

sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Beberapa konsep yang akan memperkuat tulisan ini di antara tentang kontestasi, konservasi, relasi kuasa, dan beberapa konsep yang lain.

Semoga hasil tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Besar harapan kami, tulisan ini dapat bermanfaat secara akademik dan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan kebudayaan, terutama menyangkut upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

B. Telaah Konsep

Warisan budaya atau tinggalan budaya dapat didefinisikan sebagai perangkat-perangkat simbol kolektif yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya dari kolektivitas pemiliki simbol tersebut.³ Secara garis besar, warisan budaya dapat dibedakan menjadi dua, *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tak berwujud). Dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penekanan warisan budaya hanya pada yang bersifat *tangible*, sesuai dengan Pasal 1, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pada Pasal 1 juga tersirat definisi penting yang membedakan antara warisan budaya dengan cagar budaya, jadi apa yang dikatakan sebagai cagar budaya adalah warisan budaya telah melalui proses penetapan. Selain itu, karena nilai pentingnya, maka warisan budaya tersebut harus dilestarikan. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pelestarian

³Hedi Shri Ahimsa-Putra. 2004. *Warisan Budaya* dalam “Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya”, Arwan Tuti Artha. Yogyakarta: Kunci Ilmu, hlm. 35.

adalah upaya mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.⁴

Konsep pelestarian diambil dari istilah “*conservation*” atau kita mengenalnya dengan konservasi. Konsep “*conservation*” telah dicetuskan lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika William Morris mendirikan Lembaga Pelestarian Bangunan Kuno tahun 1877. Sebetulnya, jauh sebelum itu sekitar tahun 1700, sudah muncul konsep pelestarian yang dibawa oleh Vanburgh, seorang arsitek Istana Bleinheim Inggris, namun konsep itu belum mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan dan Undang-undang yang pertama kali melandasi kebijakan konservasi lingkungan atau bangunan bersejarah dibuat pada tahun 1882. Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bangunan kuno adalah UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Awalnya, konsep konservasi terbatas pada pelestarian monumen yang lazim disebut preservasi. Konsep tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengembalian atau menjadikan monumen tersebut persis keadaan semula. Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian, sesuai kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam Piagam Burra tahun 1981.

Selain pelestarian, ada konsep pengelolaan yang menurut undang-undang adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.⁵

⁴Pelindungan yang mengandung unsur hukum dan fisik, seperti pemeliharaan, konservasi, rehabilitasi, pemugaran, dan lain-lain. Kedua adalah konsep pengembangan, yang didalamnya terdapat penataan, penyajian, penelitian, dan lain-lain. Konsep yang ketiga adalah pemanfaatan, misalnya untuk pemberdayaan benda cagar budaya, untuk peningkatan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk kepentingan lainnya.

⁵ Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum, UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa definisi pelestarian dan pengelolaan begitu luas, sehingga dapat membawa konsekuensi pada banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tersebut. Beberapa kalangan berpendapat bahwa upaya pelestarian warisan budaya akan dapat dilakukan secara maksimal apabila melibatkan tiga pihak utama, yaitu akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Sebagian yang lain, melihat bahwa peran dunia usaha menjadi penting terutama di era globalisasi dan kapitalis saat ini.

Pihak-pihak tersebut seharusnya bersinergi dan saling mendukung, namun kenyataan di lapangan sangatlah berbeda. Kurangnya koordinasi di antara mereka bahkan menjadi hal yang biasa dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia.⁶ Kami mengidentifikasi pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dan memiliki kepentingan tertentu dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya sebagai *stakeholder*. Ciri utama *stakeholder* adalah memiliki latar belakang, pola pikir, dan tindakan yang berbeda pula di antara mereka. Maka diperlukan identifikasi secara mendalam terhadap pola pikir dan tindakan para *stakeholder* untuk memudahkan dalam menyamakan persepsi di antara mereka.

Pada kasus-kasus yang terjadi, pelestarian tidak hanya digunakan sebagai cara ideologi untuk mengelola cagar budaya, namun tersirat kepentingan lain yang nampak tidak terlihat. Bahkan sejak pemerintah kolonial berkuasa, upaya pelestarian tidak hanya bertujuan untuk masalah ilmu pengetahuan semata. Dalam kata lain, kepentingan ilmiah telah menyembunyikan kepentingan yang lebih riil, yaitu kepentingan politik-ekonomi.

Politik-ekonomi merupakan studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. Politik-ekonomi dalam warisan budaya mencakup

⁶Belum adanya manajemen pengelolaan dan aturan hukum yang jelas terutama di tingkat daerah mendukung tidak optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya. Apalagi otonomi daerah menjadi tantangan tersendiri karena makin kompleksnya upaya-upaya tersebut.

hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di warisan budaya. Bila seseorang atau sekelompok orang dapat mengontrol warisan budaya berarti dia berkuasa secara *de facto*, walaupun *de jure* tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pandangan tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti *de facto*, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat.

Pendekatan politik-ekonomi merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan. Dalam warisan budaya, muncul berbagai permasalahan yang hadir tanpa diketahui secara jelas akar masalahnya. Penelitian-penelitian yang menjauhi persoalan politik-ekonomi akan sulit menganalisa persoalan yang lebih mendalam. Saat ini, Trowulan yang membuat “pusing” pemerintah karena persoalan-persoalan yang nampaknya agak sulit untuk diatasi menjadi ruang budaya yang kompleks. Kondisi ini didasari atas banyaknya kepentingan yang hadir di sana, dan pada akhirnya membawa konsekuensi munculnya kontestasi sumber daya di antara mereka sendiri.

Secara konseptual kontestasi merupakan konsep apa yang dinamakan sebagai teori disonasi warisan budaya.⁷ Kontestasi merupakan hal yang intrinsik, pada hakekatnya akan muncul bersamaan sifat warisan budaya, menjadi sebuah bagian yang tak terelakkan dari sebuah sistem dalam pengelolaan suatu warisan budaya. Kontestasi mencakup pertentangan dalam semua dimensi warisan budaya, hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, dualitas kepentingan antara warisan budaya sebagai identitas atau komoditas, hingga dualitas pemikiran antara warisan budaya sebagai modal ekonomi atau modal budaya.

Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kepentingan dan kepedulian terhadap warisan budaya, seperti yang diungkapkan oleh

⁷Tolina Loulanski. 2006. “Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach” dalam *International Journal of Cultural Property* 13, hlm. 207–233.

berbagai kelompok seperti masyarakat lokal, pemerintah, akademisi, pemilik, badan usaha, pengembang, turis, dan lain-lain yang diidentifikasi sebagai *stakeholder* atau pengguna warisan budaya. Meningkatnya jumlah orang yang ingin memiliki “saham” dalam warisan budaya karena warisan makin dianggap berpusat pada manusia, konstruksi sosial, berorientasi pada publik bukan pribadi, dan secara umum, warisan budaya milik seluruh umat manusia. Perubahan paradigma dari “object” ke “function”, menjadi pemikiran yang melandasi konsep pemanfaatan dari warisan budaya. Menurut Tolina Loulanski, “*functionalism argues that cultural heritage cannot be identified as such without referring to society and its meaning for societal processes.*”⁸

Olsen dan Timothy, menguraikan tiga tipe kontestasi.⁹ *Pertama*, di manaperbedaan klaim kelompok-kelompok sosial berbeda terhadap tempat, even, dan artefak warisan budaya yang sama. Contohnya, satu kelompok warisan budaya mungkin digantikan seluruhnya oleh kelompok lain. banyak kasus terjadi, masing-masing kelompok mengklaim kebenaran objektif masa lalu. Dalam kasus Trowulan, terdapat kelompok sosial berbeda yang sama-sama mengklaim kawasan itu.

Variasi yang *kedua*, kontestasi adalah ketika warisan budaya diinterpretasi dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian berbeda dalam satu kelompok, misalnya suatu populasi nasional atau agama. Ada kalanya, sub-sub kelompok dalam kelompok lebih luas/besar menginterpretasikan warisan budaya secara berbeda, juga menghasilkan kontestasi. Kategori *ketiga*, kontestasi warisan budaya terjadi dalam konteks masa lalu yang paralel, atau ketika lebih dari satu sejarah terjadi pada tempat dan waktu yang sama. Reinterpretasi dan pengembangan makam-makam baru yang berdiri di atas situs-situs

⁸Tolina Loulanski. 2006, hlm. 207–233.

⁹Dallen J Timothy and Gyan P. Nyaupane (ed). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge, hlm. 42.

lama merupakan salah satu andil dari keyakinan sejarah yang berbeda antara masyarakat dan terutama golongan akademisi juga pemerintah.

Kontestasi antar *stakeholder* terkait dengan relasi sosial, yaitu relasi antar individu, kelompok, dan institusi sosial dalam konteks ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, juga terkait dengan relasi kekuasaan, kemampuan untuk mengontrol kelompok lain. Kontrol adalah pengaturan internal individu dan anggota kelompok. Proses kontrol secara luas terkait dengan politik karena melibatkan relasi-relasi kelompok sosial. Dalam kasus Trowulan, di setiap situs-situs memperlihatkan adanya *stakeholder* yang memiliki kontrol terhadap *stakeholder* lain. Kondisi yang lain memperlihatkan bahwa muncul proses keberlawanan (resistensi) suatu kelompok terhadap kontrol kelompok lain karena akan mengganggu kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Trowulan ibarat arena pertarungan atau perjuangan. Suatu arena selalu menjadi ajang konflik individu atau antarkelompok yang berusaha mempertahankan atau mengubah bentuk kapital tertentu. Konsep arena perjuangan menjadi sangat menentukan karena dalam masyarakat ada yang mengontrol (menguasai) dan dikontrol (dikuasai). Meminjam pengertian dari Bourdieu, hubungan dominasi tersebut tergantung pada situasi, kapital dan strategi pelaku.¹⁰ Kapital ekonomi merupakan sumber daya yang memiliki kekuatan besar dan mudah dikonversikan ke kapital-kapital lain. Kapital budaya juga berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Pemerintah dan swasta lebih mendominasi dalam urusan pengelolaan warisan budaya karena memiliki kapital ekonomi yang besar, namun beberapa kasus, masyarakat dengan kapital budayanya mampu menjadi kelas yang dominan.

Warisan budaya tidak hanya masa lalu tetapi juga representasi dan reinterpretasi masa lalu. Peninggalan dari masa lalu tidak dilestarikan secara sembarangan, tetapi dipilih, diselamatkan, dibentuk dan

¹⁰Pemikiran Bourdieu dalam makalah Haryatmoko. 2010. *Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan: Teori Strukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya*, dalam Makalah Pasca Sarjana FIB UI, hlm. 4.

direinterpretasi oleh politik masa lalu dan sekarang. Dengan begitu, warisan budaya inheren dengan kesatuan politik. Ini tidak hanya dipengaruhi politik tetapi mempengaruhi politik. Warisan budaya dapat menjadi pondasi *nation-building* tetapi juga dapat sebagai sumber konflik.

C. Tujuan dan Metode Penelitian

Penelitian yang direncanakan berjalan selama tiga tahun ini, bertujuan untuk memahami dinamika kontestasi di Trowulan melalui pendekatan politik-ekonomi. Melalui dinamika tersebut, kita dapat mengetahui relasi sosial dan kekuasaan antar *stakeholder*, mengetahui kontrol *stakeholder* terhadap *stakeholder* lain, dan mengetahui praktik-praktik yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan masing-masing *stakeholder*. Sebagai penelitian yang bersifat *multiyears*, Pada penelitian tahun pertama ini, tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pelestarian dan pemanfaatan Trowulan. Walaupun demikian, juga disampaikan secara mendasar, tentang relasi-relasi di antara *stakeholder* dan kontrol-kontrol kekuasaan yang berlangsung.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yaitu studi literatur, observasi (pengamatan), wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Studi literatur penting dalam tahapan pertama dalam pengumpulan data penelitian ini, karena menggunakan kerangka sejarah yang menekankan pada dokumen-dokumen dan buku-buku terkait. Penekanan lingkup observasi tidak ditujukan pada benda-benda tinggalan Majapahitnya, tetapi lebih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (swasta). Observasi merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk melihat kondisi sosial kekinian di Trowulan.

Tahapan ketiga adalah wawancara, metode yang paling penting dengan menggali informasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan warisan

budaya di Trowulan. Tahapan keempat adalah FGD, yang bertujuan bukan hanya mengumpulkan informasi dari pihak yang diundang, namun mereka sekaligus sebagai objek penelitian ini. Bagaimana relasi di antara peserta berlangsung selama FGD berlangsung. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, data dianalisa melalui kritik sumber, apakah sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Tahapan kritik ini penting untuk membantu kredibilitas dan validitas hasil akhir tulisan.

BAB II

TROWULAN: SAKSI PERADABAN MAJAPAHIT

Berbagai sumber sejarah dan peninggalan arkeologi telah membuktikan bahwa pernah berdiri sebuah kerajaan dengan kebudayaan yang maju di Nusantara bernama Majapahit. Memiliki wilayah kekuasaan yang membentang luas hampir seluruh kawasan Asia Tenggara menjadikan Majapahit penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap nama besar Majapahit, dijalankanlah upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan oleh berbagai pihak. Trowulan adalah lokasi dimana masih banyak ditemukan peninggalan Majapahit. Trowulan adalah saksi peradaban Majapahit, bagian dari identitas bangsa Indonesia, bukti dari sebuah kebudayaan maju yang didukung oleh masyarakatnya dan menjadi yang terbesar pada masanya.

A. Majapahit Sebagai Kerajaan Besar Di Nusantara

Majapahit pada abad 13-14 Masehi adalah kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan abdi dari Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292, Kerajaan Singasari masa Kertanegara diserang oleh Jayakatwang yang saat itu menjabat sebagai Adipati Kediri. Kekalahan yang dialami oleh Singasari membuat Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dibantu oleh Arya Wiraraja. Pasca melarikan diri, Raden Wijaya diterima kembali oleh Jayakatwang dan diberi sebuah desa dengan dalih untuk memperkuat pertahanan Kerajaan Singasari. Di desa yang diberi nama Majapahit, Raden Wijaya membangun kekuatan dan memimpin rakyatnya, terutama rakyat yang setia dengan Raja Kertanegara.

Pada tahun 1293, Jawa kedatangan pasukan dari Tiongkok utusan Kubilai Khan untuk menghukum Singasari atas penghinaan yang

diterima utusannya pada tahun 1289.¹ Pasukan berjumlah besar itu berhenti di Pulau Belitung untuk beberapa bulan lalu memasuki Pulau Jawa melalui Sungai Brantas untuk menuju ke Daha. Kedatangan itu diketahui oleh Raden Wijaya, ia lantas meminta bergabung dengan pasukan Tiongkok. Serangan gabungan pasukan Tiongkok dan Raden Wijaya berhasil melumpuhkan tentara Daha yang membuat Jayakatwang menyerahkan diri.

Setelah kemenangan diperoleh, Raden Wijaya kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi Kubilai Khan. Selama perjalanan, Raden Wijaya dikawal oleh beberapa perwira dan kurang lebih dua ratus pasukan Tiongkok. Di tengah perjalanan, Raden Wijaya berhasil membinasakan para perwira dengan memanfaatkan berbagai tipu muslihat. Ia lantas berbalik memimpin pasukan Majapahit menyerbu pasukan Tiongkok yang masih tersisa. Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Cita-cita Raden Wijaya untuk menjatuhkan Daha akhirnya dapat terwujud dengan memanfaatkan keberadaan pasukan Tiongkok.

Tak berlangsung lama, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan baru bernama Majapahit. Pada tahun 1215, ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Lama berkuasa, Raden Wijaya akhirnya wafat pada tahun 1309 dan kemudian digantikan oleh anaknya, Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, banyak muncul pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kekacauan situasi di kerajaan dapat teratasi ketika muncul seorang prajurit yang cerdas dan berani bernama

¹Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan memperlakukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.

Gajah Mada. Beberapa pemberontakan berhasil ia padamkan, seperti pemberontakan Kuti yang hampir meruntuhkan Majapahit, padahal kedudukan Gajah Mada saat itu hanya sebagai pengawal raja. Kemahirannya mengatur siasat dan berdiplomasi mengantarkan Gajah Mada pada kedudukan tinggi di pemerintahan Majapahit sebagai Mahamantri Kerajaan.

Pada masa Jayanegara, hubungan dengan Cina kembali pulih. Perdagangan antara kedua negara meningkat dan banyak orang Tiongkok menetap di Majapahit. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya dan digantikan oleh Jayawisnuwarddhani. Pemberontakan di dalam negeri masih terus berlangsung saat itu. Diantaranya adalah pemberontakan Sadeng dan Keta yang terjadi pada tahun 1331. Namun berkat Gajah Mada, pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Setelah banyak menumpas pemberontakan dalam negeri, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum menundukkan daerah-daerah di Nusantara. Kejayaan Majapahit berlangsung ketika Hayam Wuruk berkuasa setelah menggantikan Jayawisnuwarddhani pada tahun 1350. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kebesarannya, ambisinya untuk menundukkan Nusantara tercapai pada masa itu. Pengaruh kekuasaan Majapahit dirasakan sampai Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.

Semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai masa keemasannya dan menjadi kerajaan besar yang kuat baik di bidang politik maupun ekonomi. Kebesaran kerajaan ditunjang oleh pertanian dengan sistem perairan yang teratur, perdagangan berkembang pesat, dan memiliki armada angkutan laut yang kuat. Hayam Wuruk memerintahkan membangun bendungan-bendungan dan saluran-saluran air untuk kepentingan irigasi dan mengendalikan banjir. Sejumlah pelabuhan sungai dibuat untuk memudahkan transportasi dan bongkar muat barang. Masyarakat pada masa Majapahit adalah masyarakat dengan kebudayaan yang maju. Mereka mampu membuat benda-benda berteknologi tinggi pada masanya. Bukti tercatat zaman

gemilang Majapahit dapat ditemukan dalam naskah Nagarakretagama karya Mpu Prapanca yang disusun pada tahun 1365.²

Nilai-nilai multikultur juga sudah ada pada masa Majapahit, terlihat adanya interaksi yang harmonis antara para pemeluk Islam dengan pemeluk agama Hindu Buddha. Islam sudah tersebar di Majapahit awal abad ke-14 M bersamaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Majapahit yang sedang mengalami pertumbuhan. Pesatnya perdagangan dan perekonomian Majapahit memunculkan kelompok elit baru yang mayoritas adalah pedagang asing dan para penguasa wilayah pasar perdagangan yang mayoritas beragama Islam. Besarnya peranan mereka terhadap kemajuan Majapahit, membuat Hayam Wuruk memberikan hak istimewa kepada kelompok tersebut. Mereka dianggap sebagai pejabat kerajaan dan diundang khusus pada perayaan-perayaan besar yang diselenggarakan oleh Keraton Majapahit. Imbasnya Islam secara tidak langsung berkembang di ibukota Majapahit.³

Sepeninggal Hayam Wuruk, perebutan kekuasaan antarkeluarga raja untuk memperebutkan tahta kerajaan makin meruncing. Majapahit mulai mengalami kemunduran ekonomi dan ketidakstabilan politik. Hingga memasuki abad ke 15, Majapahit mulai menghadapi masa-masa keruntuhan. Mengenai kapan dan penyebab kejatuhan Majapahit belum diketahui secara pasti. Sumber-sumber berupa prasasti, babad, naskah, dan berita perjalanan tidak memiliki kesamaan sejarah dalam memberikan informasi secara jelas, namun terdapat benang merah di antara sumber-sumber tersebut untuk dijadikan sebagai panduan dan mendekati pada kebenaran sejarah. Hingga saat ini, informasi keruntuhan Majapahit yang diyakini paling mendekati kebenaran

²Naskah Nagarakretagama menyebutkan bahwa Keraton Majapahit memiliki budaya adiluhung, anggun, dan canggih. Juga memiliki cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit.

³Adrian Perkasa. 2012. *Orang-Orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 130.

adalah pergolakan intern kerajaan dan pengaruh - atau dapat dikatakan sebagai serangan - kerajaan Islam Demak pada tahun 1527.

B. Trowulan Sebagai Warisan Budaya

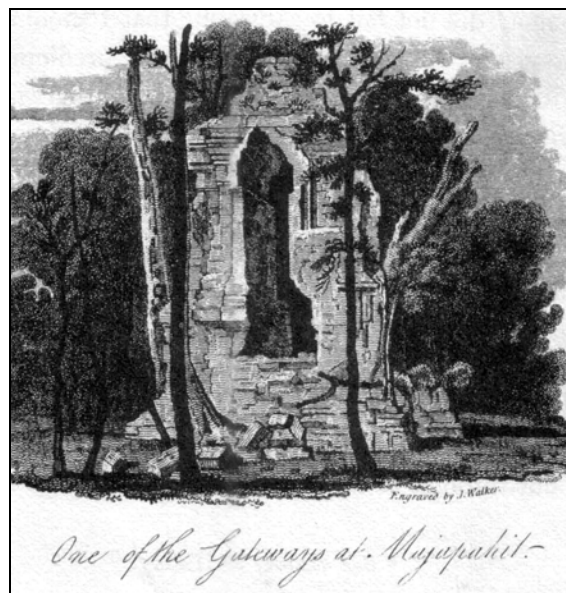
1. Trowulan: Dari Situs Menjadi Kota

Majapahit pada abad ke-14 M adalah kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. Namun setelahnya, Majapahit berangsur-angsur kehilangan kekuasaannya dan akhirnya Demak mengakhiri kebesaran Majapahit tahun 1527. Pusat kekuasaan kemudian dipindah ke Jawa Tengah di bawah Kerajaan Demak. Setelah dikalahkan oleh Demak, sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.⁴

Kurang lebih tiga abad berlangsung, tidak diketahui bagaimana kondisi pusat Kerajaan Majapahit. Hingga pada saatnya, abad ke-19 M, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa periode 1811–1816 bernama Sir Thomas Stamford Raffles menerima laporan penemuan reruntuhan bangunan dan candi yang terpencar di kawasan hutan jati. Berdasarkan laporan tersebut, Raffles memerintahkan Wardenaar untuk melakukan penelitian tahun 1815 untuk mengamati tinggalan arkeologi di daerah

⁴Kerthabumi atau Brawijaya V dianggap sebagai ayah Raden Patah, Raja Demak pertama. Pada 1468, Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit. Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus memerintah disana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Menurut prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527.

Mojokerto. Dalam laporannya ia selalu menyebutkan, “in het bosch van Majapahit” untuk tinggalan budaya yang ditemukan di Mojokerto, khususnya Trowulan. Wardenaar berhasil membuat gambar-gambar bangunan dan keterangannya, namun sayangnya gambar-gambar tersebut tidak diterbitkan. Pada tahun 1817, Raffles menulis buku “History of Java I”. Ia mengatakan bahwa nama Trowulan berasal dari kata Tran Wulan atau Terang Bulan. Dalam bukunya *History of Java*, ia juga menyebutkan “remains of gateway at Majapahit called Gapura Jati Pasar” ketika menyebut Candi Waringin Lawang, dan menyebut “one of the gateway of Majapahit” ketika menyebut Candi Brahu.

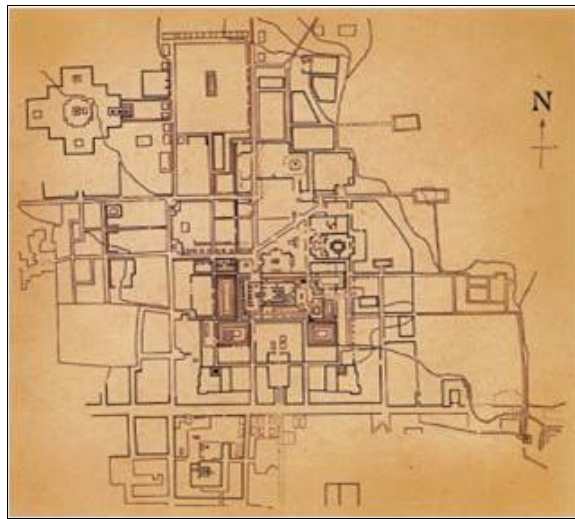


Sumber: *History of Java*, 1817

Gambar 1: Candi Brahu

Trowulan menjadi penting sebagai ruang penelitian bagi para ahli kolonial Belanda sejak tahun 1920-an. Salah satunya adalah Maclaine Pont, seorang arsitek dari Belanda yang menghubungkan gambaran

kota Majapahit dalam Nagarakretagama dengan peninggalan arkeologi di Trowulan.⁵ Anggapan-anggapan Raffles diyakinkan lagi oleh Maclaine Pont, yang menggali hampir seluruh penjuru Trowulan tahun 1924 - 1926. Hasilnya ditemukan sejumlah besar pondasi bangunan, saluran air yang tertutup dan terbuka, serta waduk-waduk. Ia berhasil membuat sketsa “kota” Majapahit di Trowulan. Benteng kota Majapahit digambarkan dalam bentuk jaringan jalan dan tembok keliling yang membentuk blok-blok empat persegi. Walaupun demikian, sketsa sebuah kota dari Maclaine Pont tetap belum menghasilkan keterangan pasti bahwa Trowulan merupakan ibukota Majapahit. Kesulitan juga dialami oleh peneliti kolonial lain seperti Kern, Stutterheim, dan Pigeaud.



Sumber: Maclaine Pont, 1924

Gambar 2: Sketsa Kota Majapahit

⁵Naskah Nagarakretagama, pupuh VIII-XII, merupakan sumber tertulis yang penting untuk mengetahui gambaran Kota Majapahit sekitar tahun 1350 M.

Setelah kemerdekaan, LAPAN membuat foto udara pada tahun 1970-an di wilayah Trowulan dan sekitarnya. Hasil foto menunjukkan adanya kanal-kanal berupa jalur-jalur yang bersilangan saling tegak lurus dengan orientasi utara-selatan dan barat-timur. Terdapat delapan jalur yang membujur barat-timur dan enam jalur yang melintang utara-selatan. Dalam penelitian ditemukan juga dua jalur yang agak menyerong. Lebar kanal-kanal berkisar 35-45 meter. Hasil penelitian kerja sama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dengan pemerintah dan universitas membuktikan bahwa Trowulan berada di ujung kipas aluvial vulkanik yang sangat luas. Pada tahun 1981-1983, keberadaan kanal-kanal dan waduk-waduk di Trowulan semakin jelas diketahui melalui foto udara yang didukung pengamatan di lapangan.



Sumber: Bakosurtanal, 1983

Gambar 3: Peta Kanal-Kanal di Trowulan

Mulai tahun 1980-an, pemerintah mulai fokus menangani Trowulan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menerbitkan

Rencana Induk Arkeologi Bekas kota Kerajaan Majapahit Trowulan pada tahun 1986. Pusat Arkeologi Nasional yang juga berada di bawah Depdikbud, melakukan kerjasama dengan *Ford Foundation* mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Arkeologi Indonesia (*Indonesian Field School of Archeology/IFSA*) tahun 1991–1993. Kegiatan itu melibatkan kurang lebih 100 instansi bidang kebudayaan. Fokus yang diangkat dalam penelitian IFSA berkenaan dengan Trowulan sebagai sebuah kota. Sejak saat itu, Trowulan dianggap sebagai sebuah peninggalan kota masa Majapahit.

2. Trowulan: Bukti-Bukti Peninggalan Majapahit dan Nilai Pentingnya

Secara administratif, Trowulan merupakan sebuah nama desa berikut kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Penamaan Trowulan sebagai kawasan arkeologi nampaknya didasarkan atas nama administrasi tersebut. Sebelumnya Trowulan dinamai sebagai situs, pemaknaan ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Setelah adanya peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, penamaan Trowulan lebih tepat dimaknai sebagai kawasan. Untuk penjelasan perbedaan antara situs dan kawasan dapat dilihat di Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peninggalan purbakala masa Majapahit memang paling banyak ditemukan di Kecamatan Trowulan yang terdiri dari 13 desa. Peninggalan yang paling banyak dijumpai ada di lima desa, yaitu Trowulan, Temon, Sentonorejo, bejijong, dan Jati Pasar. Selain itu, ada satu desa bernama Klintirejo di Kecamatan Sooko yang juga ditemukan peninggalan Majapahit.⁶

Dilihat dari jenis temuannya, distribusi peninggalan arkeologi di Trowulan tampak sebagai berikut:

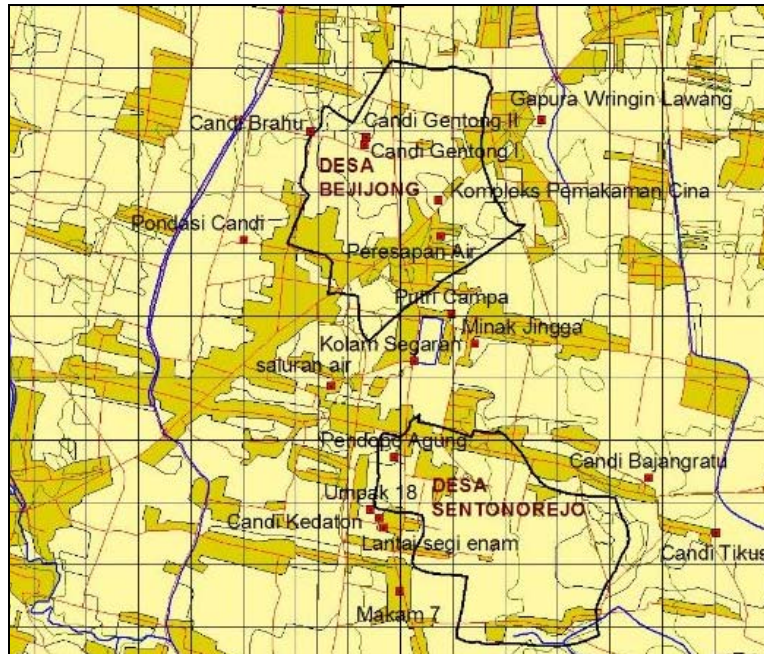
⁶Supratikno Rahardjo dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, hlm. 97.

No.	Desa	Peninggalan Arkeologi
1	Trowulan	Kolam Segaran, Candi Menak Jinggo, Makam Putri Campa, Kubur Panjang, Pemukiman Nginguk, Kubur Panggung
2	Temon	Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu
3	Sentonorejo	Bekas Pemukiman dengan lantai segi 6, Candi Kedaton dan sekitarnya, Komplek Makam Troloyo
4	Bejjong	Candi Brahu, Candi Gentong, Siti Hinggil
5	Jati Pasar	Gapura Waringin Lawang
6	Klintirejo	Bhre Kahuripan (Yoni besar dan sisa bangunan di sekitarnya)

Sumber: Depdikbud. 1986. *Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. (dengan modifikasi).

Peninggalan dalam wujud candi yang teridentifikasi di Trowulan adalah Candi Gentong, Candi Brahu, Candi Kedaton, Candi Menak Jinggo, Candi Bhre Kahuripan, Candi Tikus, Candi Siti Hinggil. Pada umumnya, candi di Trowulan dalam keadaan tidak utuh ketika ditemukan oleh para arkeolog, sehingga cukup sulit untuk mengenali latar belakang keagamaannya, kecuali Candi Bhre Kahuripan dan Candi Gentong.

Candi-candi tersebut banyak yang telah berubah fungsi. Candi Bhre Kahuripan kini menjadi tempat ziarah dan tempat menyepi. Bangunan lain yang digunakan sebagai petilasan adalah Kubur Panggung dan Siti Hinggil. Di Trowulan, juga ditemukan kompleks pemakaman Islam, yang dikenal dengan nama Makam Troloyo dan Makam Tujuh. Sayangnya, dari semua peninggalan arkeologi yang terdapat di Trowulan, tidak semua berada di bawah kendali BPCB. Muncul kelompok sosial tertentu yang melibatkan diri dalam pengelolaan sejumlah situs, baik keseluruhan atau sebagian. Mengenai masalah tersebut, pihak BPCB Trowulan belum dapat menemukan pemecahannya.



Sumber: Depbudpar dan Bakosurtanal, 2007

Mulai tahun 1990-an, pemerintah daerah melibatkan diri dalam pengelolaan makam kuno untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mengelola Komplek Makam Troloyo sebagai tempat wisata ziarah. Dalam pengelolaannya, Dinas bekerjasama dengan kepala desa dan organisasi pemuda setempat. Sayangnya, pengelolaan yang berjalan, tidak banyak melibatkan BPCB yang selama ini bertanggung jawab menangani pelestarian di Trowulan. Terdapat juga bangunan-bangunan baru yang berdiri di atas kawasan Trowulan yang dikelola oleh institusi non-pemerintah, misalnya Wihara majapahit oleh Yayasan Lumbini. Pendopo Agung

oleh Kodam V Brawijaya yang perawatannya diberikan kepada Yayasan Bina Trowulan, dan makam Mbah Hadi Sidomulyo.

Sebagai warisan budaya, situs-situs tersebut kemudian ditetapkan menjadi cagar budaya setelah melalui prosedur tertentu. Dengan banyaknya situs yang ditemukan, maka Trowulan lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kawasan. Dan untuk itu diperlukan pelestarian dan pengelolaan yang integratif. Peninggalan arkeologi yang telah disebutkan di atas, kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh sektor, sebagai berikut:

No.	Nama Sektor	Nama Situs	Jumlah
1	Wilayah A	Kolam Segaran, Candi Minak Jinggo, Makam Putri Campa, dan Kubur Panjang	4
2	Wilayah B	Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu	2
3	Wilayah C	Pemukiman Sentonorejo, Pemukiman Nglinguk, Candi Kedaton, makam Troloyo, Kubur Panggung	5
4	Wilayah D	Candi Brahu dan Candi Gentong	2
5	Wilayah E	Gapura Waringin Lawang	1
6	Wilayah F	Candi Siti Hinggil	1
7	Wilayah G	Candi Bhre Kahuripan dan sekitarnya	1

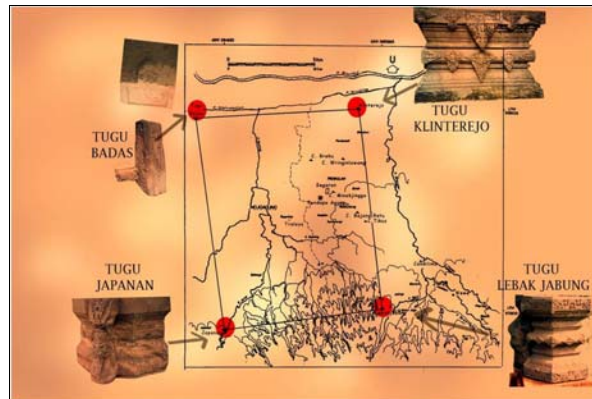
Sumber: Depdikbud. 1986. *Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. (dengan modifikasi).

Saat ini, banyak arkeolog berpendapat bahwa kawasan Trowulan merupakan satu-satunya peninggalan pemukiman kota pada masa Hindu Buddha. Luas kawasan ini dapat mengacu kepada beberapa pendapat. Menurut Prof. Mundardjito, luas wilayah mencakup 10 x 10 km², sedangkan menurut IFSA, luas wilayah mencakup 11 x 9 km² sama dengan pendapat dari tim Balai Arkeologi (Balar) di Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Nurhadi Rangkuti, yang juga menemukan yoni dan tugu yang dianggap sebagai batas-batas kawasan. Satu

pendapat lain datang dari Prof. Agus Aris Munandar, arkeolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa luas kawasan hanya 4 x 5 km² sesuai dengan lokasi peninggalan yang berhasil ditemukan.

Sebagai sebuah kawasan, Trowulan memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Merupakan wakil satu-satunya dari situs perkotaan masa Hindu buddha di Indonesia.
2. Trowulan memiliki artefak dan struktur bangunan yang beraneka ragam, baik dalam bentuk, bahan, dan teknologi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data untuk kajian berbagai bidang ilmu pengetahuan.
3. Kawasan ini memiliki sejumlah tinggalan penting yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pendidikan.
4. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata budaya.
5. Kawasan Trowulan memiliki peluang untuk diusulkan menjadi warisan budaya nasional dan bahkan warisan budaya dunia.



Sumber: Nurhadi Rangkuti

Gambar 5: Interpretasi Batas Situs Kota Majapahit
9 x 11 Km²

⁷*Ibid.*, hlm. 90-91.

BAB III

PEMAKNAAN TROWULAN "MASA LALU DAN MASA KINI"

Ketika Raffles menaruh perhatian terhadap Trowulan, maka dimulailah dunia penelitian masuk ke kawasan tersebut. Penelitian ilmiah pertama kali dilakukan oleh Wardenaar atas perintah Raffles pada tahun 1815. Penelitian Wardenaar dilanjutkan oleh peneliti kolonial lain sepanjang abad ke-19 M. Mereka meyakini Trowulan memiliki arti penting bagi informasi jejak sejarah di Pulau Jawa. Memasuki abad ke-20 M, peneliti pribumi mulai terlibat di Trowulan melanjutkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bukti-bukti yang berhasil diperoleh sejak masa kolonial hingga saat ini mengerucut pada keyakinan bahwa Trowulan pernah menjadi pusat kota Majapahit. Perkembangan terjadi seiring dengan perubahan makna Trowulan, yang awalnya hanyalah ruang akademi lantas meluas menjadi ruang ideologi dan ekonomi.

A. Masa Kolonial – Kemerdekaan

Rasa penasaran bangsa Belanda terhadap ilmu pengetahuan telah berlangsung sejak lama. Pada masa kolonial, beberapa orang Belanda tertarik untuk mengetahui kehidupan masyarakat di Nusantara khususnya Jawa. Menurut mereka kehidupan masyarakat di Pulau Jawa begitu unik dan menarik. Rasa ketertarikan mereka lantas diaplikasikan dalam bentuk penelitian guna mempelajari secara mendalam pola kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Orang yang mempelajari kehidupan sosial di Jawa itu dikenal sebagai Javanolog atau ahli (peneliti) Jawa.

Menjadi bagian dari negara maju, menjadikan pola pikir orang Belanda jauh berkembang daripada orang pribumi. Orang Belanda cenderung memiliki perasaan tak selalu puas dengan objek yang mereka teliti atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Kebutuhan terhadap ilmu

pengetahuan tetap tumbuh dan dipelihara oleh para peneliti Belanda dalam melihat Kehidupan di Pulau Jawa. Mulai dari Javanolog pada masa lalu hingga sejarawan Belanda masa kini, mereka terus menciptakan hasil karya penelitian yang berawal rasa penasaran terhadap kehidupan masyarakat di Jawa.

Dalam beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk buku atau penerbitan yang lain, para peneliti Belanda cenderung mampu mengetahui aspek kehidupan di Jawa secara mendalam, seperti sistem kerajaan, kelas sosial, jaringan perdagangan, sistem perekonomian, dan sistem kebudayaan. Besarnya minat peneliti Belanda terhadap kehidupan di Jawa terbukti dengan banyaknya arsip tentang Jawa yang tersedia di Belanda. Fakta ini turut diperkuat oleh keterangan beberapa peneliti Indonesia yang pernah berkunjung ke Belanda. Mereka menemukan arsip tentang Jawa sangat lengkap dibandingkan arsip yang ada di Indonesia.

Kondisi di atas pada perkembangannya dapat membawa kesulitan bagi peneliti Indonesia yang ingin melakukan penelitian tentang Jawa karena arsipnya mayoritas berada di Belanda. Namun sisi positifnya, ketertarikan peneliti Belanda terhadap Pulau Jawa turut menciptakan budaya penelitian bagi orang-orang di Indonesia. Para peneliti di Indonesia yang berkiprah dalam ilmu pengetahuan khususnya dunia arkeologi, pada umumnya tidak menyadari bahwa mereka melaksanakan kegiatan yang pada dasarnya adalah warisan kolonial. Sejarah perkembangan arkeologi di Indonesia berawal dari minat terhadap sumberdaya arkeologi yang tumbuh pada zaman kolonial, dari komunitas kolonial, dan lalu dikembangkan oleh pemerintah kolonial.¹

Pada tahun 1851, didirikan *Royal Institute of Linguistics, Geography and Ethnology of the Netherlands Indies* atau *Koninklijk Instituut Vor Taal-, Land- En Volkenkunde Van Nederlandsch- Indie* (KITLV) yang bertempat di Leiden. Organisasi ini telah memberi sumbangan penting

¹Daud A. Tanudirjo. *Dari Abdi Negara Menjadi Abdi Masyarakat: Masa Depan Pengelola Sumberdaya Arkeologi di Indonesia*, hlm. 1.

dalam membangun pengetahuan tentang penduduk, kebudayaan, dan masyarakat Hindia-Belanda melalui cabang ilmu bernama *Indologie* atau *Indonesainistiek* (studi tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia).² KITLV mengambil posisi yang sejalan dengan kepentingan kolonial mempertahankan *status quo* di Hindia Belanda. Hubungan antara negara dengan dunia keilmuan begitu mantap sehingga citra tentang Hindia Belanda serta para penghuninya di kepala masyarakat Belanda didekonstruksi dan direkonstruksi oleh ilmuwan.³

Tokoh-tokoh dalam KITLV, tidak hanya mencari pengetahuan Hindia Belanda karena hasrat intelektual saja, namun juga karena kepentingan kolonial. Dalam namanya saja jelas diperlihatkan bahwa KITLV dikontrol kuat oleh Belanda. Awalnya KITLV didirikan melalui kolaborasi antara para politisi di Belanda dengan para ilmuwan terkemuka dari negeri tersebut. Peran negara terlihat dalam berbagai hal seperti upaya mendorong penelitian-penelitian, menjembatani hubungan di antara para akademisi, dan menyelaraskan dinamika di kalangan akademik dengan dinamika birokrasi kolonial Hindia Belanda.⁴

Minat terhadap sumberdaya arkeologi di Indonesia pada awalnya tumbuh dari pribadi-pribadi yang kemudian membentuk organisasi tertentu. Baru pada tahap berikutnya, pemerintah ikut campur tangan. Oleh karena itu, lembaga dan organisasi peminat arkeologi berkembang menjadi lembaga pemerintah dan akhirnya bermuara pada terbentuknya *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) pada tahun 1913. Ketika itulah, arkeologi di Indonesia berubah statusnya sebagai Arkeologi Pengabdian Negara (*Archaeology in the service of the state*). Peran ini semakin sah dengan ditetapkannya MO (*Monumenten Ordonnantie*) 1931, yang menyatakan bahwa semua sumberdaya arkeologi adalah

² Hanneman Samuel. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu, 2010, hlm. 12.

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

milik negara. Pengakuan itu merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan penguasaan dan akses pemerintah kolonial atas sumberdaya arkeologi yang dimiliki bangsa Indonesia.⁵

Salah satu contohnya – dan merupakan kajian pokok dalam tulisan ini – adalah sumberdaya arkeologi yang ditemukan di Trowulan. Penemuan sumberdaya arkeologi dalam bentuk bangunan-bangunan purbakala di Trowulan adalah andil besar keterlibatan para peneliti kolonial. Sejak Wardenaar yang diberikan tanggung jawab oleh Raffles untuk meneliti sumberdaya arkeologi di Trowulan hingga Maclaine Pont, seorang arsitek Belanda yang menghubungkan Trowulan dengan gambaran Majapahit dari Nagarakretagama. Dari penelitian yang bersifat individu, Maclaine Pont lantas mendirikan perkumpulan organisasi/ lembaga bernama *Oudheidkundige Vereeniging Majapahit* (OVM). Tujuan dari lembaga yang berdiri pada tanggal 15 April 1924 adalah melakukan penelitian peninggalan purbakala di Trowulan.

Dalam kegiatan penelitian lembaga itu, Maclaine Plont bekerjasama dengan Bupati Mojokerto saat itu bernama RAA Kromodjojo Adinegoro. Selain Maclaine Pont, Penelitian tentang Trowulan juga dilakukan oleh peneliti lainnya seperti H. Kern, Stutterheim,⁶ Pigeaud, dan peneliti lainnya.⁷ Pada tahun 1926, Maclaine Pont dan RAA Kromodjojo Adinegoro merintis berdirinya Museum Trowulan yang pertama. Museum Trowulan berfungsi untuk menyimpan dan

⁵Daud A. Tanudirjo, hlm. 1

⁶Prof. Dr. H. Kern adalah penerjemah pertama *Ngarakrtagama*, sedangkan Dr. WF Stutterheim adalah ahli kepurbakalaan Indonesia, pernah bekerja di Dinas Purbakala Hindia Belanda pada tahun 1924. Lihat P. Swantoro. 2002. *Dari buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Gramedia, hlm. 165-171.

⁷Dr. TH. Pigeaud, seorang ahli sastra Jawa dari Belanda juga dikenal karena studi monumentalnya mengenai *Nagarakretagama*. Pada awal abad ke-19 M, laporan-laporan orang Belanda menyatakan bahwa Trowulan adalah daerah hutan lebat yang membuat peneliti Belanda menghadapi kesulitan dalam melakukan penelitian.

menampilkan hasil penelitian OVM. Saat ini, Museum Trowulan berada di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan yang berada di bawah pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Salah satu bentuk tanggung jawab BPCB adalah menjaga pelestarian sumberdaya arkeologi di Trowulan.

Pada awalnya, penelitian di Trowulan dipusatkan pada peninggalan monumental dan bangunan tunggal seperti candi, makam, dan petirtaan. Karena masih bersifat parsial maka lingkup penelitian belum masuk ke dalam konteks kawasan. Trowulan cenderung lebih bermakna sebagai tempat/lokasi dimana banyak ditemukan sumberdaya arkeologi. Barulah sejak Maclaine Pont membuat sebuah sketsa kota Majapahit hasil dari penelitiannya, lingkup penelitian mulai mengarah tidak hanya pada bangunan tunggal, tetapi juga pada konteks sebuah ruang atau kawasan dengan sistem masyarakat dan kebudayaannya.

Setelah meninjau dari sisi para ahli, tentu penting juga mengetahui sikap masyarakat Trowulan terhadap sumberdaya arkeologi di wilayahnya. Tetapi apakah sudah ada masyarakat yang bermukim di Trowulan pada masa itu, jika jawabannya sudah ada maka sejak kapan dan masyarakat seperti apa? Apakah merupakan keturunan dari masyarakat masa Majapahit? atau hanya masyarakat pendatang? Pertanyaan ini penting mengingat keberadaan sumberdaya arkeologi sebagai warisan budaya tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sekitarnya.

Informasi keberadaan masyarakat di Trowulan pada masa kolonial memang sulit untuk diketahui, berbeda pada masa setelah kemerdekaan yang memang ada dukungan dari sumber lisan. Walaupun demikian, beberapa sumber tertulis menjelaskan bahwa sampai masa awal abad ke-20 M, masyarakat Mojokerto (mungkin termasuk Trowulan) memaknai peninggalan purbakala sebagai benda keramat dan lokasinya adalah tempat angker.⁸ Boleh jadi informasi tersebut sejalan dengan

⁸Tjokro Soedjono. *Hubungan Peninggalan Purbakala dengan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Mojokerto*, dalam Buletin Arkeologi Desawarnana No. 02 Juni 2005, hlm. 21.

opini yang menyatakan adanya upaya/strategi peneliti kolonial untuk memisahkan ruang antara peninggalan purbakala dengan masyarakat pribumi dengan mengkonstruksi peninggalan purbakala sebagai benda keramat dan angker. Sehingga mereka takut untuk mengusik keberadaan sumberdaya arkeologi tersebut dan peneliti kolonial dapat melakukan penelitian tanpa ada “gangguan” dari masyarakat. Namun secara akademik, tetap belum dapat dipastikan karena tidak ada dukungan bukti-bukti yang valid.

Secara garis besar, kepentingan terhadap Trowulan pada masa kolonial hingga kemerdekaan cenderung bersifat akademik, yaitu upaya menggali pengetahuan melalui penelitian-penelitian sejarah dan arkeologi. Kepentingan akademik dalam melihat Trowulan saat itu sejalan dengan aturan kolonial yaitu MO No. 238 Tahun 1931. Upaya penemuan dan penelitian sumberdaya arkeologi di Trowulan pada masa kolonial hingga kemerdekaan didominasi oleh para peneliti kolonial yang kemudian status beberapa dari mereka berada di bawah pemerintah kolonial. Sedangkan masyarakat setempat, cenderung mengambil jarak terhadap keberadaan peninggalan purbakala dengan menjadikannya sebagai benda keramat. Keterlibatan mereka mungkin sebatas tenaga pembantu di lapangan dan ini pun perlu kajian historis yang lebih mendalam.

B. Pasca Kemerdekaan – 1999

Setelah Indonesia merdeka, peran pengelolaan sumberdaya arkeologi secara berangsur-angsur diserahkan kepada bangsa Indonesia. Selama proses itu berlangsung, sikap mental ‘kolonial’ ikut diwariskan kepada para peneliti dan pengelola sumberdaya arkeologi di Indonesia. Sikap mental ‘kolonial’ itu masih terbawa ketika pemerintah Indonesia merancang undang-undang baru sebagai pengganti MO 1931. Hasilnya tidak mengherankan jika UU yang dihasilkan, yaitu Undang Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya lebih mirip sebagai terjemahan MO 1931 ke dalam bahasa Indonesia.⁹

⁹Daud A. Tanudirjo, *loc.cit.*, hlm. 1

Dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, negara tetap memiliki peran besar dan dominan seperti pada UU masa kolonial. Sedangkan pihak lain khususnya masyarakat, belum mendapatkan peran cukup dalam upaya pelestarian warisan budaya. Ketentuan dalam UU yang baru itu cenderung memihak pada kepentingan negara ketimbang kepentingan masyarakat. Pemerintah menempatkan diri mereka seolah-olah yang paling berhak dalam menentukan nasib warisan budaya.

Dalam upaya pelestarian peninggalan purbakala di Trowulan, pemerintah pusat mulai membuka kantor purbakala cabang Mojokerto dengan nama Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional Seksi Bangunan pada tahun 1963. Setelah berganti nama beberapa kali, pada tanggal 2002, kantor ini berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini). Selama bertugas di lapangan, BP3 Jawa Timur dibantu oleh Balai Arkeologi (Balar) di Yogyakarta. Balar adalah UPT yang bertanggung jawab kepada Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas) yang berkedudukan di Jakarta.

Perbedaan antara BP3 dengan Balar adalah masalah kewenangan. BP3 lebih mengkhususkan pada upaya pelestarian, sedangkan Balar pada upaya penelitian. BP3 berkoordinasi dengan Balar apabila ditemukan peninggalan purbakala baik melalui pengamatan lapangan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat. Perkiraan adanya peninggalan purbakala di suatu lokasi ditindaklanjuti oleh Balar untuk segera mereka melakukan penelitian dan ekskavasi. Setelah selesai, peninggalan purbakala yang berhasil ditemukan diserahkan kepada BP3 untuk dilestarikan. Namun terkadang, BP3 juga melakukan penelitian apabila muncul kondisi-kondisi yang mendesak.

Pada masa ini, penelitian tidak hanya dilakukan oleh para ahli secara pribadi, namun juga pemerintah, dan perguruan tinggi. Proses penelitian masih terus berlangsung diimbangi oleh pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah terutama ketika mereka membuat Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan yang

selesai disusun pada tahun 1986. Namun, upaya pelestarian dan pengelolaan yang dilakukan pada masa ini menghadapi berbagai macam kepentingan yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi secara baik.

Setelah melalui penelitian bertahun-tahun, para peneliti dan pemerintah cenderung sepakat melihat Trowulan sebagai ruang penting karena merupakan bekas kota Majapahit. Dalam upaya pelestarian, pemerintah mengalami permasalahan terkait keberadaan pemukiman penduduk yang relatif padat di antara situs-situs peninggalan Majapahit. Untuk memperjelas batas-batas situs, pemerintah membuat sistem zoning. Namun, pemerintah tidak mungkin memindahkan semua penduduk di kawasan karena kurangnya dana untuk pembebasan lahan. Upaya untuk mensiasatinya adalah membuat sistem sel, bukan lingkaran-lingkaran konsentris sebagaimana diterapkan pada kawasan Candi Borobudur. Sayangnya, cara ini tidak memberi kesan kalau Trowulan merupakan sebuah peninggalan kota.

Beberapa arkeolog tetap berprinsip bahwa Trowulan jangan dipandang secara terpisah berdasarkan temuan situs, tetapi harus dilihat secara kesatuan. Upaya pembebasan lahan merupakan salah satu cara untuk melindungi lapisan Majapahit yang merupakan data penting untuk mengetahui keberadaan sebuah kota. Namun, upaya terbatas pembebasan lahan dan sosialisasi pemerintah belum mampu menekan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang berpotensi merusak peninggalan purbakala di Trowulan. Mengapa demikian?

Sejak dahulu, masyarakat merupakan kelompok yang hidup dan memiliki ikatan identitas dengan tanah dan lingkungan sekitarnya. Pada masa kerajaan, tanah dikuasai oleh raja, sedangkan masyarakat tidak berhak atas tanah kecuali raja memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Tanah tahun 1870 (*Agrarische Wet 1870*). UU itu mengatur hak atas tanah secara perorangan (hak eigendom) dan hak

atas secara adat (hak ulayat).¹⁰ Meskipun hak eigendom secara hukum memberi wewenang sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk berbuat bebas dengan tanah yang bersangkutan, baik mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah itu, tetapi bagi kebanyakan rakyat tidak ada pengaruhnya terhadap kepemilikannya sebab rakyat tetap merasa tanah yang ia miliki adalah haknya. Setelah masa kemerdekaan, muncul Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menggantikan UU tahun 1870, namun masalah kepemilikan tanah masih banyak mengalami hambatan, seperti masalah konflik tanah akibat pengurusan yang tidak setimpal dengan ganti rugi yang diberikan, hingga sulitnya mengurus sertifikat tanah. Belum lagi swasta yang memiliki kapital ekonomi yang besar biasanya mampu mengambil alih kepemilikan tanah dari masyarakat.

Di Trowulan, aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung lama. Pada tahun 1950–1970, selain bertani masyarakat Trowulan melakukan pendulangan emas di lahan-lahan yang mereka kuasai.¹¹ Kegiatan itu tetap berjalan hingga akhirnya deposit emas dianggap habis karena sudah sulit untuk ditemukan. Masyarakat lantas beralih menjadi pencari bata merah yaitu bata peninggalan Majapahit. Bata merah yang berhasil dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membangun rumah atau ditumbuk untuk dijadikan semen merah untuk bahan campuran plester tembok rumah.

Lama-kelamaan bata merah Majapahit yang makin jarang ditemukan, mendorong masyarakat beralih profesi dari pembuat semen merah menjadi pembuat batu bata menggunakan tanah yang berasal dari lahan mereka. Masyarakat menggali tanah sampai kedalaman tertentu dimana lapisan tanah yang subur ditemukan. Tanah hasil penggalian lahan

¹⁰Hayari. *Sejarah Kepemilikan Tanah Perorangan Sebelum dan Sesudah UUPA 1960*, dalam SELAMI IPS Edisi Nomor 19 Volume 1 Tahun XI Desember 2006.

¹¹Puslitbangbud. 2008. *Kajian Integratif Pelindungan dan Pengembangan 'Situs Kerajaan Majapahit' di Trowulan*, hlm. 37.

dicetak menjadi batu bata, sedangkan lahan tersebut dijadikan sebagai lahan persawahan.

Aktivitas penggalian lahan oleh masyarakat berpotensi merusak peninggalan purbakala yang terkandung di dalamnya. Muncul dua pandangan berbeda yang diwakili oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa berhak mengolah lahan di Trowulan karena status kepemilikan, keterikatan dengan lingkungan sekitar, dan kasus-kasus sengketa yang kebanyakan merugikan mereka. Kondisi tersebut menciptakan kecenderungan untuk tidak peduli dengan keberadaan peninggalan purbakala yang terkandung di dalam lahan mereka. Kenyataan tersebut dapat menjadi contoh bahwa kepentingan ekonomi menjadi alasan tindakan sosial masyarakat.

Tapi bukankah pada masa kolonial, masyarakat cenderung mengambil jarak dengan peninggalan purbakala. Penggalian lahan oleh masyarakat saat ini cenderung merusak peninggalan purbakala yang berada di dalam tanah, bukan pada peninggalan yang berupa bangunan atau situs yang berada di atas tanah yang sebagian besar sudah ditemukan pada masa kolonial. Menurut beberapa sumber, penggalian lahan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah luar Trowulan.¹²

Lalu apakah tidak ada pemanfaatan lahan oleh masyarakat asli Trowulan? Pertanyaan ini terkait dengan upaya pengambilalihan peninggalan purbakala dalam bentuk situs oleh pemerintah. Ternyata upaya tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena beberapa situs sudah terlebih dulu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat ritual. Mungkin ada hubungan antara masyarakat ini dengan status mereka sebagai masyarakat asli Trowulan yang sejak masa kolonial menganggap situs-situs peninggalan Majapahit sebagai tempat angker dan keramat. Perbedaannya, apabila pada masa kolonial, mereka tidak mengukulkan situs-situs peninggalan Majapahit dalam bentuk ritual dan belum ditemukan sumber yang memperkuat hal itu, tetapi pada

¹²Tjokro Soedjono. *loc. cit.*, hlm. 21.

masa ini, beberapa di antara mereka telah melakukan praktik-praktik ritual di situs-situs tersebut.

Kondisi di atas memiliki keterkaitan dengan perubahan masyarakat yang terjadi pada masa 1965-an. Saat itu sedang terjadi Kemelut politik di dalam negeri sebagai akibat dan reaksi terhadap peristiwa Gestapu pada tahun 1965. Pemberontakan itu diyakini oleh pemerintah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Imbas dari peristiwa tersebut adalah mendorong masyarakat harus mempunyai agama yang diakui oleh pemerintah atau bisa dituduh sebagai penganut komunis.

Masyarakat asli Trowulan yang memanfaatkan situs peninggalan Majapahit adalah mereka yang secara identitas adalah orang Islam tetapi melakukan ritual-ritual yang lebih dekat pada kejawen atau kepercayaan Jawa. Kemungkinan besar mereka adalah masyarakat kepercayaan yang masih terikat dengan sistem kepercayaan masyarakat Majapahit, namun dikarenakan pada awal orde baru harus memiliki agama, maka banyak dari mereka yang memeluk Islam atau agama lain yang diakui oleh pemerintah. Walaupun demikian, mereka tetap menjalankan ritual-ritual seperti aliran kepercayaan yang menggabungkan ajaran Islam dengan Hindu dan Kejawen.

Salah satu situs yang diidentifikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat kepercayaan di Trowulan adalah Siti Hinggil. Mereka meyakini adanya ikatan identitas dengan kehidupan masa Majapahit. Siti Hinggil diyakini oleh masyarakat kepercayaan sebagai Makam Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Masyarakat pada hari-hari tertentu melakukan ritual di tempat tersebut untuk meminta petunjuk dan sebagainya. Siti Hinggil yang awalnya diduga sebagai candi masa Majapahit telah berubah secara fisik bangunan dan pemanfaatannya. Pada masa orde baru, beberapa pejabat tinggi di era tersebut memberikan dana untuk memugar situs dan menambah beberapa bangunan di sekitarnya. Selain Siti Hinggil, beberapa situs lain juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat ritual dan ziarah, seperti Makam Troloyo, Kubur Panjang, Kubur Panggung, dan Makam Putri Campa.

Selain pemanfaatan situs oleh masyarakat, masa ini juga ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan baru di Trowulan, seperti pembangunan Wihara Agama Buddha di Desa Bejjong dan Pura Majapahit di Desa Trowulan. Pendirian bangunan-bangunan bercirikan agama di Trowulan menandakan bahwa mereka yang mendirikan ingin membangun hubungan identitas dengan Majapahit, bahwa pada masa Majapahit pernah berkembang agama yang sama seperti mereka. Penjelasan tentang pemanfaatan situs-situs dan berdirinya bangunan-bangunan baru akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mulai melibatkan diri dalam upaya pengelolaan Trowulan. Pada tahun 1999, Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto mengembangkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di Trowulan. Salah upaya yang dilakukan untuk mendukung *master plan* tersebut adalah meningkatkan manajemen pengelolaan kepariwisataan, menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pada masa ini, Trowulan tidak hanya dimaknai sebagai ruang akademi tapi juga sudah memperlihatkan adanya kepentingan ideologi dan ekonomi. Kepentingan ideologi diwakili oleh pemerintah yang merasa bahwa Trowulan memiliki nilai penting bagi sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Selain pemerintah, masyarakat yang merasa bagian dari Majapahit dengan mengaktualisasikan diri dengan ritual-ritual tertentu di situs-situs yang dianggap memiliki ikatan dengan mereka, juga dapat diidentifikasi sebagai pihak yang memiliki kepentingan ideologi. Sedangkan kepentingan ekonomi datang dari kelompok masyarakat yang lain terutama pendatang, yang melakukan upaya pemanfaatan lahan di Trowulan dalam bentuk yang bermacam-macam sebagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain mereka, pemerintah daerah juga berorientasi pada kepentingan ekonomi khususnya pariwisata dalam keterlibatan pengelolaan di Trowulan. Munculnya kepentingan akademi, ideologi, dan ekonomi, walau belum mencapai porsi yang besar, namun sejalan dengan pemikiran dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menggantikan

MO 1931. Walaupun dibandingkan dengan pihak lain, pemerintah pusat masih memegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksana UU tersebut.

C. Masa 1999 - Sekarang

Sejak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat mendukung Trowulan sebagai peninggalan kota masa Majapahit, gaung Trowulan semakin meluas dan berbagai pihak ingin merasakan menjadi bagian dari gaung tersebut. Berbarengan dengan itu, kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peninggalan purbakala yang ada di Trowulan sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka.

Sebagian masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap keberadaan warisan budaya di Trowulan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dengan didukung tingkat pendidikan yang tinggi pula. Beberapa diantaranya membentuk Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebudayaan dan menaruh perhatian terhadap Trowulan. LSM-LSM tersebut selain berlokasi di Trowulan, juga di wilayah lain seperti Surabaya dan Jakarta. Selain LSM, terdapat juga yayasan yang ikut terlibat dalam mengelola bangunan peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan, seperti Yayasan Bina Majapahit yang mengelola Pendopo Agung.

Pada masa ini, Trowulan menjadi ruang terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepentingan. Para akademisi, pemerintah, masyarakat, dan kini dunia usaha mulai terlibat dalam pengembangan fasilitas di Trowulan. Misalnya pembangunan tempat makan, pom bensin, penginapan, dan fasilitas lainnya. Keberadaan Trowulan saat ini menjadi informasi penting yang dicari oleh mereka yang peduli dengan warisan budaya. Peran media kemudian hadir sebagai kontrol terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengelolaan di Trowulan.

Masyarakat dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pelestarian dan pengelolaan warisan budaya mulai diperhatikan sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang baru, yaitu UU No. 11 tahun

2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU itu dimasukkan unsur masyarakat dan dunia usaha sebagai salah satu unsur penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, berbeda dengan UU sebelumnya. UU baru itu juga telah memperhatikan keseimbangan antara aspek akademi, ideologi, dan ekonomi.

Pada masa ini, Trowulan sudah dimaknai sebagai sebuah kawasan budaya, bukan dilihat secara terpisah-pisah berdasarkan temuan situs. Trowulan dianggap memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, sehingga menjadi daya tarik bagi kelompok baru untuk memanfaatkannya. Pemaknaan Trowulan saat ini, tidak hanya sebagai ruang akademik, namun sudah masuk pada ruang ideologik dan ekonomik dengan porsi yang sama besar. Identitas nilai-nilai budaya yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mereka dan dunia usaha menjadi ciri penting pada perkembangan hingga saat ini. Secara garis besar, pihak-pihak yang berperan penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan Trowulan sampai saat ini adalah (1) *Government sector*, (2) *Community sector*, (3) *Corporate sector*, dan (4) *Academic sector*. Dimana, empat kelompok tersebut dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik sesuai dengan kepentingan yang diperjuangkan.

BAB IV

STAKEHOLDER DI TROWULAN

Identifikasi *stakeholder* menjadi bagian penting untuk melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Trowulan. Para *stakeholder* tersebut melakukan praktik/tindakan sosial yang berbeda satu sama lain. Praktik sosial dilandasi oleh pola pikir (*habitus*) dan latar belakang budaya yang terbentuk secara historis. Perbedaan pandangan dalam memaknai Trowulan itulah salah satu penyebab lahirnya kontestasi dalam perebutan sumber daya di Trowulan menjadi tidak terhindarkan, baik dalam hubungan yang saling menguntungkan atau sebaliknya.

A. Identifikasi *Stakeholder*

Berikut adalah *stakeholder* yang teridentifikasi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan di Trowulan:

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan-Jawa Timur

BPCB adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki BPCB adalah Jawa Timur, berlokasi di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Latar Belakang pendirian BPCB adalah membantu pemerintah pusat dalam melestarikan warisan budaya yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Biasanya lokasi kantor BPCB berdekatan dengan lokasi warisan budaya. Seperti halnya dengan BPCB Jawa Timur yang terletak di Trowulan karena lokasi itu merupakan kawasan warisan budaya Majapahit, sehingga BPCB Jawa Timur lebih dikenal dengan nama BPCB Trowulan.

Sejarah pendirian BPCB diawali pada tahun 1963, dimana berdasarkan SK Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 118/62 tanggal 13

Desember 1962, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963 dibuka kantor cabang Mojokerto dengan nama Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional Seksi Bangunan di Trowulan. Setelah berpindah tempat dan mengalami perubahan nomenklatur beberapa kali, pada tanggal 30 Juli 1979, nama kantor berubah kembali menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jawa Timur, selanjutnya pada tanggal 1988 kantor SPSP Jawa Timur dipindahkan ke Jl. Majapahit 141-143 Trowulan (lokasi sampai saat ini). Pada tanggal 21 Agustus 2002 nama kantor berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur (BP3) Jawa Timur. Disinilah kemudian masyarakat lebih mengenal lembaga ini sebagai kantor purbakala. Pada pertengahan tahun 2012, BP3 Jawa Timur berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

Ketika berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sebelum akhirnya kembali lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), BPCB yang saat itu bernama BP3, mengalami kebingungan dalam upaya pelestarian peninggalan purbakala. Masuknya unsur pariwisata membuat BPCB harus membuat program yang mendukung pengembangan tersebut. Inilah yang kemudian menjadi masalah, karena praktek-praktek yang dijalankan untuk pengembangan pariwisata belum mengedepankan nilai-nilai pelestarian. Sebagai contoh adalah pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) untuk mendukung pengembangan pariwisata di Trowulan. Akan tetapi, banyak kalangan terutama para arkeolog menganggap bahwa upaya tersebut tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Pondasi-pondasi yang dibuat pada pembangunan awal PIM telah merusak lapisan struktur Majapahit. Pembangunan ini pun sempat diberhentikan dan kemudian dilanjutkan kembali setelah merubah rancangan bangunan yang lebih memperhatikan nilai-nilai pelestarian.

BPCB Jawa Timur memang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan peninggalan Majapahit di Trowulan. Kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain untuk upaya tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini belum terbangun secara baik. Beberapa kelompok

masyarakat merasa penanganan yang dilakukan oleh BPCB tidak menguntungkan bagi mereka, misalnya pembebasan lahan milik masyarakat. Temuan benda-benda purbakala yang diberikan dari masyarakat kepada BPCB untuk dijadikan koleksi museum juga tidak jelas keberadaannya, sehingga ada rasa ketidakpercayaan sebagian masyarakat yang membuat mereka lebih memilih untuk menjual peninggalan purbakala yang mereka temukan kepada kolektor barang antik atau pemburu harta karun. Sebagian masyarakat yang lain, merasa terbantu dengan keberadaan BPCB Trowulan, misalnya pemberian izin tempat situs untuk digunakan sebagai tempat pementasan kesenian tradisional masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan yang mengangkat juru pelihara situs dari masyarakat sangat membantu ekonomi sebagian dari mereka.

2. Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas)

Arkenas merupakan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cikal bakal Arkenas dimulai dari berdirinya Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) yang sudah ada sejak masa kolonial dengan nama berbeda. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur organisasi, LPPN dibagi menjadi dua unit, salah satunya bersifat penelitian bernama Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N) yang kini menjadi Pusat Arkeologi Nasional. Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian terkait dengan peninggalan purbakala. Lokasi lembaga ini terletak di Jakarta, namun memiliki UPT di daerah bernama Balai Arkeologi (Balar), salah satunya berlokasi di DI Yogyakarta, yang salah satu cakupan wilayah penelitiannya adalah Trowulan.

3. Balai Arkeologi (Balar) di Yogyakarta

Balar DIY adalah unit pelaksana teknis dibawah Arkenas, Kemendikbud yang mempunyai fungsi penelitian arkeologi. Salah satu cakupan wilayah penelitian Balar DIY adalah Jawa Timur, termasuk Trowulan. BPCB Trowulan akan berkoordinasi dengan Balar DIY apabila ditemukan peninggalan purbakala baik melalui pengamatan

lapangan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat. Lokasi peninggalan purbakala di suatu lokasi akan diteliti oleh Balar dan setelah berhasil ditemukan peninggalan purbakala diserahkan kepada BPCB untuk dilestarikan.

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur

Tidak banyak keterlibatan yang dilakukan oleh Disbudpar Provinsi Jawa Timur dalam upaya pelestarian dan pengelolaan di Trowulan. Hanya pada keterlibatan mereka memberikan bantuan kepada juru pelihara (jupel) situs dan pemasangan papan petunjuk/larangan yang ada di Trowulan bekerjasama dengan BPCB Trowulan.

5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto

Disporabudpar Kabupaten Mojokerto merupakan pendatang baru dalam keterlibatan pengelolaan di Trowulan. Berbeda dengan BPCB Trowulan, Disporabudpar Kabupaten Mojokerto lebih mengedepankan kepentingan pemanfaatan Trowulan sebagai obyek wisata. Salah satu situs yang dikelola oleh Disporabudpar adalah Makam Troloyo. Bersama-sama dengan aparat desa setempat (Desa Sentonorejo), mereka mengelola Makam Troloyo tanpa melibatkan BPCB Trowulan. Pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto merubah bentuk asli pemakaman dan kurang mengedepankan nilai pelestarian. Sampai saat ini, koordinasi antara Disporabudpar dengan BPCB Trowulan belum berjalan dengan baik, walaupun di Museum Trowulan yang berada di bawah BPCB Trowulan, pihak Disporabudpar sudah menerapkan tiket masuk kepada pengunjung.

6. Pengrajin Lokal

Di Trowulan terdapat pengrajin lokal dari berbagai keahlian, diantaranya pengrajin cor logam, terakota, arca batu, dan manik-manik.

Desa Bejjong adalah sentra industri cor logam yang awalnya dirintis oleh seorang penduduk bernama Sabar. Dahulu Sabar adalah asisten Maclaine Pont. Sabar banyak belajar mengenai keahlian cor logam dan ragam seni arca kuno dari Maclaine Pont. Setelah pensiun sebagai PNS, Sabar memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan usaha cor logam. Hasil produksi cor logam Sabar banyak diminati oleh pembeli. Untuk menambah jumlah produksi, Sabar mempekerjakan puluhan pemuda di bengkelnya. Setelah pemuda tersebut menguasai teknik pengecoran arca, mereka lantas memisahkan diri dan membangun usaha sendiri.¹ Di Desa Bejjong, juga dijumpai pengrajin manik-manik. Produk kerajinan manik-manik beragam jenis, dari kalung, gelang, hingga berbagai hiasan dinding.

Terakota adalah kerajinan dalam bentuk arca orang, binatang, miniatur candi yang sebagian besar meniru bentuk seni terakota masa Majapahit. Di Desa Trowulan, terdapat beberapa pengrajin terakota yang masih berjalan sampai saat ini. Sedangkan Desa Jati Pasar terkenal sebagai sentra kerajinan arca batu andesit. Pada umumnya, produk arca batu berwujud dewa dewi berlatar agama Hindu Buddha.

Rata-rata semua produksi yang dihasilkan oleh pengrajin lokal dipasarkan ke wilayah Bali, Surabaya, Yogyakarta, beberapa kota besar di Jawa, dan bahkan sampai ke Kalimantan. Sebagian besar pengrajin beranggapan bahwa pemerintah kurang peduli dengan keberadaan mereka. Selama ini mereka berusaha dengan kerja keras sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah.

¹ Puslitbangbud. *op.cit.*, hlm. 31.



Sumber: Puslitbangbud, 2008
Gambar 6: Pengrajin Terakota



Sumber: Puslitbangbud, 2008
Gambar 7: Pengrajin Manik-Manik



Sumber: Puslitbangbud, 2008
Gambar 8: Pengrajin Arca Batu



Sumber: PMB LIPI, 2012
Gambar 9: Pengrajin Cor Logam

7. Pengrajin/Pembuat Bata

Tanah liat yang berasal dari lahan di Trowulan memiliki kualitas cukup bagus untuk diproduksi menjadi bata. Sehingga banyak masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih menjadi pembuat bata. Pengrajin batu bata muncul pada tahun 1970-an. Linggan sebagai tempat pembuatan bata jumlahnya sekitar 4000 buah dan menyebar di seluruh wilayah Trowulan. Cara kerjanya dengan menggali tanah sampai lapisan tertentu, tanah kemudian dicetak menjadi bata. Lahan untuk membuat bata dapat berupa lahan sendiri atau sewa dari orang lain. Amat disayangkan, karena banyak peninggalan Majapahit yang ikut tergerus ketika proses penggalian tanah berlangsung.

8. Pedagang Kecil

Mereka adalah masyarakat sekitar yang memanfaatkan situs-situs di Trowulan yang ramai pengunjung sebagai tempat menjual barang dagangan. Salah satu tempat yang diramaikan oleh pedagang kecil adalah Makam Troloyo.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Di Trowulan terdapat LSM yang concern di dalam pelestarian cagar budaya. Pada umumnya anggota dari LSM ini berasal dari masyarakat yang berpendidikan. Bagi mereka, Trowulan memiliki nilai penting karena banyaknya peninggalan purbakala yang menyimpan informasi tentang sejarah Majapahit. Maka diperlukan upaya untuk menjaganya dari segala upaya pengrusakan. Beberapa contoh LSM yang peduli dengan Trowulan adalah Gotrah Wilwatikta diketuai oleh Anam Anis, SH yang berdiri sejak tahun 2005 di Trowulan dan Komunitas Peduli Majapahit berdiri sejak tahun 2008 yang berlokasi di Jakarta.

10. Yayasan Lumbini

Adalah Yayasan Agama Buddha yang membangun Wihara Majapahit di Desa Bejjong, Trowulan. Wihara ini tak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha, tetapi juga wisatawan umum karena terdapat objek menarik patung Buddha tidur dengan ukuran besar di dalam lokasi Wihara. Wihara ini diresmikan pada tanggal 31 Desember 1989 oleh Gubernur Jawa Timur Sularso. Yayasan Lumbini memanfaatkan wilayah desa Bejjong sebagai tempat untuk membangun wihara karena pernah ditemukan Arca Buddha Dewi Tara di lokasi itu.

11. Yayasan Bina Trowulan

Yayasan ini adalah pengelola Pendopo Agung. Pendopo Agung adalah bangunan baru yang dulunya di lokasi tersebut pernah berdiri bangunan peninggalan Majapahit. Pembangunan gedung Pendopo Agung dilaksanakan pada tahun 1975, dan diserahkan pemeliharaannya oleh

Yayasan Bina Trowulan, namun untuk kepemilikan berada di bawah Kodam V Brawijaya, Jawa Timur.

12. Kelompok Kesenian

Kebangkitan kembali ingatan masyarakat Trowulan akan kebesaran Majapahit nampaknya telah menghidupkan kembali gairah budaya di lingkungan mereka. Gairah budaya yang dimaksud adalah semangat untuk merevitalisasi budaya-budaya yang ada dan bahkan menciptakan kebudayaan-kebudayaan material baru sebagai ekspresi dari penghargaan mereka atas kebudayaan Majapahit yang telah cukup lama terlupakan. Di wilayah Trowulan pada umumnya telah lahir kelompok-kelompok kesenian di samping juga mereka yang melakukan usaha di bidang benda-benda seni. Salah satunya adalah Paguyuban Macapat Among Tani Majapahit yang berdiri pada tahun 2002 dan Kelompok Bagaskara yang didirikan oleh Supriyadi. Pemerintah Mojokerto telah ikut mendorong lahirnya kelompok-kelompok kesenian tersebut. Untuk mengembangkan mereka, pemerintah melalui Disporabudpar dan kadang bekerjasama dengan BPCB Trowulan memfasilitasi masyarakat kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. BPCB Trowulan sebagai instansi yang berwenang menangani pelestarian situs telah menyediakan tempat di sekitar Wringin Lawang untuk pentas bagi kalangan seni ini.

13. Masyarakat Umum

Pihak lain sebagai pemangku kepentingan dengan benda-benda cagar budaya adalah masyarakat umum sebagai pengunjung terhadap benda-benda budaya ini. Masyarakat dalam hal ini berhak menikmati keagungan benda-benda ini serta mendapatkan informasi tentang benda itu sendiri sebagai hasil kebudayaan. Masyarakat pengunjung terhadap benda-benda cagar budaya ini tentu saja mempunyai maksud dalam kunjungannya. Di samping untuk sekedar berkreasi banyak juga dari mereka yang mempunyai tujuan-tujuan religius mengingat dari situs-situs yang ada, banyak juga yang sarat dengan nilai keagamaan. Mengenai yang terakhir ini, salah satunya terjadi di Makam Troloyo.

14. Masyarakat Islam (NU)

Mayoritas masyarakat di Trowulan dapat teridentifikasi sebagai masyarakat Islam Nahdatul Ulama (NU). Mereka mempunyai posisi penting dalam struktur sosial di Trowulan. Terdapat tokoh petinggi NU yang juga ketua salah satu organisasi di bawah NU yang tinggal di Trowulan. Dalam konteks kemajapahitan, mereka menganggap bahwa Islam merupakan bagian dari Majapahit, tidak hanya Hindu dan Buddha. Adanya peninggalan candi bernuansa Hindu dan Buddha menimbulkan kekhawatiran mereka apabila agama Hindu dan Buddha berkembang di Trowulan. Disinilah kemudian muncul semacam larangan-larangan tertentu ketika ada pihak yang ingin mendirikan bangunan baru bernuansa Hindu Buddha.

15. Masyarakat Kepercayaan

Mereka biasanya mengaku sebagai keturunan dari Majapahit. Secara formalitas mereka mengaku beragama Islam, namun dalam ritual kesehariannya lebih cenderung memadukan antara ajaran Islam, Hindu, dan Animisme. Mereka menyebutnya itu adalah agama Majapahit. Salah satu contoh dari kelompok mereka adalah Hyang Suryo, tokoh kepercayaan yang mengaku keturunan Raja Majapahit. Hyang Suryo bukanlah asli Trowulan, ia berasal dari Kediri. Ia membangun Pura Majapahit di sebelah rumahnya di Trowulan. Pendirian pura ini mendapat tentangan dari masyarakat sekitar yang notabene pemeluk agama Islam (NU). Sempat mengalami beberapa konflik, akhirnya disepakati bahwa Pura tetap berdiri namun tidak boleh digunakan untuk umum.

16. Perguruan Tinggi

Kepentingan utama perguruan tinggi di Trowulan adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam mengenali karakter situs melalui kegiatan-kegiatan kunjungan, survei, penggalian, dan analisis data lapangan. Beberapa mahasiswa dan pengajar perguruan tinggi juga melakukan riset untuk penulisan karya akhir studi, baik atas nama

lembaga riset atau minat sendiri. Perguruan tinggi yang sering melakukan penelitian di Trowulan adalah Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM)

17. Media

Unsur ini berperan penting menyampaikan informasi tentang perkembangan kawasan Trowulan. Media adalah pihak yang lebih objektif dalam melihat suatu permasalahan pelestarian di Trowulan.

18. Pemburu Harta Karun

Pihak ini sulit untuk teridentifikasi secara mendalam, karena hanya mereka yang memiliki jaringan tertentu yang dapat bertemu dengan pemburu harta karun. Peninggalan Majapahit yang mereka temukan menjadi barang dagangan di dalam maupun luar negeri. Keberadaan mereka sudah menjadi rahasia umum, namun sayangnya pihak BPCB Trowulan dan kepolisian setempat mengalami kesulitan untuk membongkar jaringan ini.

19. Pihak Swasta

Secara umum, swasta yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki kapital besar, tidak hanya ekonomi tapi juga kekuasaan dan melibatkan diri ke dalam pengelolaan warisan budaya di Trowulan. Mereka bisanya berasal dari kota-kota besar terutama Jakarta dan Surabaya. Beberapa kasus, mereka dapat memenangkan kontestasi dengan pihak pelestarian dan masyarakat ketika terjadi perselisihan dalam kepemilikan warisan budaya.

B. Hubungan Antara *Stakeholder*

Hubungan antara *stakeholder* yang satu dengan yang lain dapat terlihat ketika berlangsung kasus-kasus pemanfaatan dan pengelolaan Trowulan. Bagaimana masing-masing *stakeholder* menjalankan praktik/tindakannya tidak dapat dilepaskan dari habitus dan kapital yang mereka miliki, juga di dorong oleh lingkungan dari luar yang

dapat mempengaruhi cara pandang mereka. Berikut adalah beberapa kasus yang terjadi:

1. Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat

Pada tahun 1950-1970, sebagian besar petani di Trowulan bercocok tanam di lahan kering yang tidak terjangkau saluran irigasi. Untuk menopang kebutuhan hidupnya, mereka melakukan pencarian emas di lahan-lahan yang mereka kuasai. Emas tersebut berasal dari peninggalan kerajaan Majapahit yang terpendam di bawah tanah Trowulan. Pada saat itu, banyak sekali emas yang berhasil ditemukan oleh masyarakat, dari yang serpihan hingga yang masih berbentuk perhiasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pada saat itu banyak temuan emas dan peninggalan purbakala yang ditemukan masyarakat lantas diserahkan kepada BP3 Trowulan (BPCB saat ini). Akan tetapi, sebagian emas dan peninggalan purbakala yang diserahkan tidak berada di museum, dan setelah dilacak oleh masyarakat jejak keberadaan emas dan beberapa peninggalan purbakala tersebut sudah hilang. Jika ini benar, BPCB harus mampu menyelidiki siapa dibalik hilangnya emas dan peninggalan purbakala tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena sampai saat ini, sebagian masyarakat tidak menaruh kepercayaan terhadap BPCB sebagai lembaga pelestari warisan budaya di Trowulan.

Selain itu, sebagian masyarakat merasa enggan untuk menyerahkan barang temuan ke BPCB Trowulan atau Museum Trowulan karena nilai uang penghargaan yang diberikan sangat rendah apabila dibandingkan dengan nilai jual kepada pemburu harta karun atau pedagang barang antik. Para pemburu harta karun tersebut biasanya berkeliling ke linggan-linggan untuk mencari dan membeli tinggalan arkeolog yang ditemukan oleh masyarakat.

Kegiatan pencarian emas berlangsung lama hingga akhirnya peninggalan emas dianggap habis karena sudah sulit ditemukan. Masyarakat kemudian beralih menjadi pencari bata merah yang sangat banyak ditemukan pada situs-situs di Trowulan. Bata merah tersebut

kemudian ditumbuk untuk dijadikan semen merah yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Pada tahun 1970-an, ketersediaan bata merah banyak berkurang, sebagian dari masyarakat beralih menjadi pembuat bata. Banyaknya linggan yang tersebar di Trowulan didukung oleh permintaan pasar atas produk bata Trowulan yang dianggap memiliki kualitas cukup baik. Bagi pemilik lahan, usaha pembuatan bata selain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan atau penyewaan lahan, juga memiliki maksud untuk mengubah lahan mereka dari lahan kering menjadi lahan subur.²

Menurut Prof. Agus Aris Munandar, arkeolog dari UI, ada kemungkinan penggalian lahan di Trowulan bertujuan lain selain untuk mendapatkan bahan untuk membuat bata dan mencari lapisan tanah yang subur. Karena beberapa kasus di lapangan memperlihatkan setelah lahan digali dalam kedalaman 1,5 – 4 meter dan sudah tidak ditemukan tinggalan arkeologi maka lahan itu akan ditinggalkan. Nampaknya ada tujuan lain yaitu mencari benda-benda tinggalan Majapahit yang dianggap memiliki nilai penting sehingga apabila dijual akan tinggi harganya di pasaran.

Pola pikir masyarakat seperti pembuat batu bata ini terbentuk melalui proses yang panjang. Sejak awal masyarakat menganggap bahwa lahan yang mereka kuasai berhak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Terutama bagi mereka yang memiliki sertifikat sah kepemilikan tanah. Kehadiran pemerintah untuk melarang pengrusakan sumberdaya arkeologi yang terkandung di lahan mereka sama saja melarang mereka untuk mencari nafkah. Ketika pemerintah mulai mensosialisasikan bahwa ada upaya untuk mengurangi pengrusakan sumberdaya tersebut, muncul kesadaran masyarakat bahwa mereka perlu terlibat dalam melestarikan peninggalan purbakala tersebut. Upaya-upaya pelestarian lantas mereka lakukan, seperti menyerahkan temuan benda purbakala kepada BPCB, menghubungi BPCB apabila di lahan mereka ditemukan struktur bangunan, dan mau membebaskan lahan mereka dengan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

² *Ibid.*, hlm. 38.



Sumber: PMB-LIPI, 2012

Gambar 10: Linggan (Tempat Pembuatan Bata)



Sumber: PMB-LIPI, 2012

Gambar 11: Linggan (Tempat Pembuatan Bata)



Sumber: Prof. Mundardjito

Gambar 12: Linggan (Tempat Pembuatan Bata)

Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat semakin pudar ketika BPCB belum mampu memberikan perhatian kepada mereka malah melakukan hal-hal yang dapat diartikan berbeda oleh masyarakat. Misalnya benda-benda temuan purbakala yang diserahkan oleh masyarakat tidak semuanya ditaruh di museum, ada benda-benda yang hilang jejak keberadaannya, ditambah pula imbalan penghargaan yang relatif kecil. Untuk kasus pembebasan lahan ternyata ganti rugi tidak mampu menutupi untuk membangun/ membeli tempat tinggal

yang baru. Kondisi ini nampaknya terus berlangsung, karena di satu sisi BPCB sendiri tidak diberikan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah hasil dari kekecewaan mereka karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Simbol-simbol identitas budaya Majapahit yang seharusnya mereka jaga, diartikulasikan ke dalam bentuk tindakan yang berbeda. Bentuk-bentuk penghormatan seperti ziarah dan ritual-ritual ke situs-situs peninggalan Majapahit merupakan cara mereka membangun ikatan identitas dengan nenek moyang mereka -orang Majapahit-, dan juga memperkuat identitas budaya simbol-simbol kemajapahitan.

Pemerintah dalam hal ini BPCB Trowulan, tidak dapat berbuat banyak untuk melarang kegiatan masyarakat. Kapital ekonomi yang mereka miliki tidak cukup untuk membebaskan lahan dan imbalan penghargaan atas temuan benda-benda purbakala yang diserahkan oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan BPCB Trowulan adalah melibatkan masyarakat untuk menjadi juru pelihara situs apabila di dekat tempat tinggal mereka ditemukan tinggalan arkeologi.³ Namun karena hanya sebagian saja masyarakat yang dilibatkan, pada dasarnya tidak mampu merubah pandangan masyarakat. Disinilah kemudian muncul pencari harta karun yang mendapat “berkah” karena dengan kapital ekonomi yang mereka punya mampu membeli benda-benda peninggalan Majapahit dari masyarakat.

2. Pemanfaatan di Komplek Makam Troloyo, Putri Campa, dan Siti Hinggil

Komplek Makam Troloyo, terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.⁴ Makam ini merupakan bukti

³Wawancara dengan Aris Sofiani, kepala BPCB Trowulan Jawa Timur, 2012.

⁴Komplek Makam Troloyo dulunya merupakan sebuah hutan. Menurut cerita rakyat, Troloyo adalah tempat peristirahatan bagi kaum niagawan muslim dalam rangka menyebarkan agama Islam kepada Prabu

bahwa terdapat komunitas Islam pada masa Majapahit. salah satu nisan yang berhasil ditemukan di dalam kompleks makam, bertuliskan nama Islam “*Zainudin*”. Sayangnya, letak nisan yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Sedangkan nama-nama yang dimakamkan di kompleks ini lebih didasarkan pada kepercayaan masyarakat.⁵

Tidak jauh dari Makam Troloyo, terdapat tujuh buah makam yang dikenal dengan nama Makam Tujuh. Tidak seperti dengan makam-makam yang ada di dalam Makam Troloyo, ketujuh makam ini memang sudah terbukti berasal dari Majapahit. Hal tersebut dapat terlihat dari simbol Surya Majapahit dan kaligrafi Islam yang terukir di nisan. Namun yang lebih dikenal dan lebih sering dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam Troloyo ketimbang Makam Tujuh.

Brawijaya V beserta para pengikutnya. Di hutan Troloyo tersebut kemudian dibuat petilasan untuk menandai peristiwa itu. Arti tralaya berasal dari kata setra dan pralaya. Setra berarti tegal/tanah lapang tempat pembuangan bangkai (mayat), sedangkan berarti rusak/mati/kiamat. Kata setra dan pralaya disingkat menjadai ralaya. P.J. Veth, adalah peneliti yang pertama kali mengkaji tentang makam itu dan hasilnya diterbitkan pada tahun 1878 dalam buku Java II. Kemudian L.C. Damais, seorang sarjana asal Perancis, hasil penelitiannya dalam tulisan “*Etudes Javanaises I. Les Tombes Musulmanes datees de Tralaya*” yang dimuat dalam BEFEO (Bulletin de Ecole francaise D’extremement-Orient). Tome XLVII Fas. 2. 1957. Menurut Damais, angka tahun tertua yang terdapat di Komplek Makam Troloyo berasal dari abad XIV dan termuda berasal dari abad XVI (data BPCB Jawa Timur).

⁵ Makam-makam yang terdapat di dalam Komplek Makam Troloyo: 1) Cungkup makam yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Abdul Qodir Jailani Sini, Syekh Maulana Skah, dan Syekh Maulana Ibrahim. 2) Makam Walisongo. 3) Makam Sunan Ngudung. 4) Makam Putri Kencono Wungu dan Anjasmoro. 5) Makam Tujuh yang berisi tujuh buah makam.



Sumber: PMB LIPI, 2012
Gambar 13: Makam Troloyo



Sumber: Puslitbangbud, 2012
Gambar 14: Kaligrafi Islam di Makam Tujuh

Makam Troloyo makin dikenal oleh masyarakat sebagai tempat ziarah sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur mengadakan kunjungan ziarah ke tempat tersebut sekitar bulan Juni 2001.⁶ Sejak saat itu, Makam Troloyo banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari Trowulan maupun dari daerah lain. Makam Troloyo kemudian sering dikunjungi oleh para pejabat tinggi. Pada hari-hari tertentu, seperti malam Jum'at Legi, saat kegiatan haul Syekh Jumadil Qubro, dan Gerebeg Suro, di makam Troloyo dilakukan upacara adat oleh masyarakat.

Gus Dur membawa ikatan emosional kepada masyarakat peziarah dengan menghubungkan keberadaan Makam Troloyo dengan sejarah perkembangan Islam dan identitas Wali Songo sebagai tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai salah satu tokoh yang disegani oleh masyarakat (masyarakat NU), Gus Dur secara eksplisit pernah menyebutkan bahwa dirinya masih keturunan Tan Kim Han, salah seorang panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mengantarkan pendirian Kerajaan Demak. Gus Dur kemudian mengidentifikasi bahwa Syekh Abdul Qodir yang menjadi salah satu nama di Komplek Makam Troloyo sebagai Tan Kim Han. Dapat

⁶ Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001.

terlihat bahwa Gus Dur menempatkan posisi dirinya sebagai tokoh yang penting dan memiliki keterkaitan dengan Komplek Makam Troloyo. Masyarakat Trowulan dan daerah lain yang notabene merupakan warga nahdliyin (pengikut NU) otomatis akan mengikuti pesan yang disampaikan oleh Gus Dur sebagai pemimpin mereka.

Ramainya masyarakat yang berziarah ke makam Troloyo, menghadirkan potensi pariwisata khususnya wisata ziarah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto melihat bahwa Komplek Makam Troloyo dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata unggulan di daerah Trowulan. Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mulai nampak dengan menambah bangunan baru dan beberapa fasilitas di komplek makam tersebut. Seperti bangunan lorong beratap, nisan-nisan yang diganti bahan keramik dan pembangunan lahan parkir di depan komplek makam.

Makam Troloyo selalu ramai dikunjungi peziarah pada bulan puasa dan bulan besar kalender hijrah. Banyaknya peziarah yang berkunjung ke Komplek Makam Troloyo mempunyai nilai positif bagi masyarakat sekitar. Pendapatan mereka bertambah dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima di sekitar komplek makam. Terkait dengan itu, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mulai menata pedagang kaki lima dan keberadaan sekitar komplek makam biar terlihat rapi dan nyaman bagi para pengunjung.

Bersama dengan Desa Sentonorejo, Disporabudpar membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menarik pengunjung. Juga dilakukan penataan pedagang kaki lima di depan area makam. Namun demikian,



Sumber: PMB LIPI, 2012

Gambar 15: Penziarah di Makam Troloyo



Sumber: PMB LIPI, 2012

Gambar 16: Pedagang di Makam Troloyo

pembangunan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pelestarian.⁷ Misalnya pembangunan fasilitas penunjangnya di sekitar situs ini dibangun sarana parkir luas yang dibangun secara permanen di atas bekas kanal-kanal kuno. Menurut salah satu pegawai BPCB Trowulan, struktur bekas kanal kuno masa Majapahit itu sudah tidak utuh sehingga tidak ada informasi yang dapat diperoleh dari bekas kanal itu.⁸

BPCB Trowulan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pelestarian nampak melepas Komplek Makam Troloyo begitu saja. Pada awalnya BPCB Trowulan memang terlibat dalam pengelolaan Komplek Makam Troloyo karena ditemukan peninggalan Majapahit. Akan tetapi, setelah diambil alih oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, pihak BPCB sudah tidak mengurus lagi Komplek Makam Troloyo. Pengelolaan kini dibawah kendali Disporabudpar bersama dengan Desa Sentonorejo.

Dari kondisi di atas, dapat teridentifikasi adanya 4 (empat) kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Komplek Makam Troloyo. Pertama adalah Disporabudpar Kabupaten Mojokerto yang mewakili kepentingan pariwisata. Kedua, BPCB Trowulan yang

⁷ <http://disporabudpar.mojokertokab.go.id>

⁸ Informasi tentang keberadaan kanal di bawah lahan Makam Troloyo masih simpang siur.

mewakili kepentingan pelestarian. Ketiga, masyarakat peziarah yang memanfaatkan keberadaan makam Troloyo untuk kepentingan mereka.⁹ Keempat, Desa Sentonorejo yang terdiri dari kepala desa dan masyarakat yang menjadi pedagang di sekitar Komplek Makam Troloyo. Pihak keempat cenderung mewakili kepentingan ekonomi. Selain keempat kelompok tersebut, muncul aktor dalam keterlibatan pemanfaatan kompleks makam, yaitu Gus Dur. Terlepas dari ada tidaknya nuansa politis atas klaim Gus Dur sebagai keturunan dari salah satu tokoh dari makam yang ada di kompleks tersebut, Gus Dur telah menghidupkan makam Troloyo sebagai tempat yang wajib untuk dikunjungi oleh masyarakat Islam. Sehingga dapat membangkitkan pariwisata di lokasi tersebut.



Sumber: PMB-LIPI, 2012
Gambar 17: Siti Hinggil



Sumber: PMB-LIPI, 2012
Gambar 18: Petilasan Raden Wijaya

Siti Hinggil, tempat yang diyakini sebagai makam Raden Wijaya oleh masyarakat kepercayaan. Pada mulanya Siti Hinggil adalah bangunan berbentuk candi yang kemudian di atasnya dijadikan bangunan

⁹ Peziarah datang ke makam Troloyo dengan berbagai tujuan, yaitu (1) mereka yang ingin tahu keberadaan makam Troloyo, (2) mereka yang datang untuk memberikan doa kepada leluhur Walisongo dengan membacakan ayat-ayat suci Al Quran, (3) mereka yang datang untuk mendapat ilmu relijius dari para leluhur yang berada di makam itu.

pemakaman.¹⁰ Situs ini sudah lama dikelola oleh masyarakat yang cenderung meyakini aliran kepercayaan. Untuk biaya perawatan bangunan, mereka memperoleh dana yang berasal dari tamu-tamu yang datang untuk kepentingan ziarah. Tamu-tamu yang datang tidak hanya masyarakat umum, namun juga mereka yang tergolong pejabat tinggi negara. Bahkan sebagian besar bangunan baru yang mengelilingi situs berasal dari bantuan dana para pejabat tersebut.¹¹

Disporabudpar Kabupaten Mojokerto tidak banyak berperan dalam pengelolaan situs ini. Memang pernah ada bantuan dana untuk pendirian bangunan yang kurang begitu jelas fungsinya. Bangunan tersebut terletak di luar pagar situs dan lebih seperti tempat penjualan tiket. Beberapa pihak, seperti juru pelihara situs menyayangkan berdirinya bangunan itu karena mengganggu kenyamanan pandangan situs dari luar.

Dalam pengelolaan situs, Disporabudpar tidak ikut terlibat dalam urusan retribusi, melainkan desa sekitar yang memungut biaya (sumbangan) kepada para peziarah. Hasil sumbangan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, termasuk kepada juru pelihara. Sedangkan BPCB Trowulan memainkan perannya hanya pada saat penemuan awal situs. Ketika situs dianggap memiliki nilai penting dalam kaitannya dengan leluhur, beberapa tamu seperti pejabat tinggi negara saat itu “mengambil alih” kepemilikan dengan cara memberikan bantuan untuk pendirian bangunan pendukung dan pagar di sekeliling situs. BPCB nampak tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya

¹⁰Situs Siti Hinggil berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Siti Hinggil atau yang artinya Tanah Tinggi atau mungkin dikonotasikan dengan tanah yang diagungkan terletak di dekat lakasi Candi Brahu. Konon Siti Hinggil dulunya berupa punden yang pernah menjadi tempat pertapaan Raden Wijaya. Situs Siti Hinggil banyak dikunjungi peziarah khususnya pada malam Jum'at Legi dan pada bulan Suro.

¹¹Wawancara dengan Bapak Kukup, juru pelihara Siti Hinggil, 2012.

pengelolaan situs diambil alih oleh masyarakat setempat dan juru pelihara diberi tanggung jawab untuk merawat situs.

Akses masuk ke Siti Hinggil terutama diberikan kepada mereka yang memang bermaksud ritual (ziarah).¹² Kondisi ini tentunya akan menyulitkan bagi pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan penelitian. Bangunan-bangunan yang didirikan di dalam situs lebih dimaksudkan untuk kegiatan ritual. di atas situs terdapat sebuah pohon besar yang kini masih dibiarkan tumbuh, padahal akarnya menembus dan merusak konstruksi yang ada di bawahnya. Keberadaan pohon ini mengandung nilai sakral yang besar di kalangan para peziarah dan pelaku ritual. Banyak kepercayaan yang muncul dari kesakralan pohon tersebut, yang membuat pohon itu tidak akan ditebang dan tetap dipelihara.

Dalam kasus pemanfaatan Siti Hinggil, dapat teridentifikasi bahwa ada 5 (lima) kelompok kepentingan yang pernah dan masih terlibat hingga saat ini. Pertama, adalah masyarakat kepercayaan yang mengelola situs ini hingga saat ini. Konteks kepentingan mereka adalah simbol identitas dan nilai kepercayaan terhadap leluhur dan keturunan Majapahit. Kedua, adalah swasta yang dapat dikategorikan sebagai mereka yang memberikan bantuan untuk pendirian bangunan-bangunan di sekeliling situs. Kepentingannya tidak jauh berbeda dengan kelompok yang pertama.

Ketiga, adalah aparat desa yang berperan dalam pungutan (sumbangan) bagi peziarah atau tamu/wisatawan yang berkunjung ke situs. Kepentingan kelompok ini jelas pada aspek ekonomi. Keempat, adalah Disporabudpar Kabupaten Mojokerto yang sepertinya masih ragu dalam melibatkan diri dalam pemanfaatan situs. Hal ini terlihat dari

¹²Juru pelihara Siti Hinggil membedakan pengertian antara ziarah dan ritual. Pemaknaan ziarah diberikan kepada mereka yang biasanya bersama-sama datang ke makam atau tempat spritual dengan dipimpin satu orang yang dipercaya. Sedangkan ritual adalah kegiatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa dipimpin oleh siapapun dengan tujuan meminta petunjuk.

bantuan dana untuk pendirian bangunan yang kemudian setelah bangunan selesai, Disporabudpar seperti membiarkan dan tidak ada kelanjutan untuk apa fungsi bangunan tersebut didirikan. Kepentingan kelompok ini mungkin pada aspek pariwisata, tapi dikarenakan situs Siti Hinggil tidak ramai pengunjung seperti makam Troloyo, Disporabudpar belum terlalu yakin untuk mengembangkan wisata ziarah di tempat ini. Kelima, adalah BPCB Trowulan, pada awalnya *stakeholder* ini paling berkepentingan terhadap situs, namun dikarenakan ketidakjelasan pelestarian dan pengelolaan maka situs diambil alih oleh swasta yang memiliki dana lebih jelas daripada BPCB Trowulan.

Makam Putri Campa, Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pada pemanfaatan makam ini. Makam Putri Campa terletak di Desa Unggahan, Kecamatan Trowulan. Pada kompleks makam tersebut terdapat batu nisan yang dianggap sebagai Makam Putri Campa. Menurut Babad Tanah Jawi, Putri Campa adalah Permaisuri Raja Brawijaya. Makam Putri Campa hingga saat ini masih dikeramatkan dan sering dikunjungi oleh peziarah pada hari Jum'at Legi.

Sebelum Gus Dur berkunjung ke Makam Troloyo, ia sering berziarah ke Makam Putri Campa. Sebagai seorang tokoh yang disegani, maka pengikutnya pun banyak yang melakukan ziarah ke makam tersebut. Sehingga tempat ini selalu ramai dikunjungi. Namun semenjak Gus Dur tidak pernah berkunjung ke makam ini, para pengikutnya pun sudah tidak banyak yang datang untuk berziarah ke Makam Putri Campa. Pengelolaan Makam Putri Campa berada di bawah BPCB Trowulan. Walaupun demikian, amat disayangkan karena halaman dalam Makam Putri Campa diberi cungkup besar dengan lantai keramik sehingga telah merubah bentuk aslinya sama sekali. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan makam Troloyo dan Siti Hinggil, pemanfaatan Makam Putri Campa masih memperlihatkan pada nilai-nilai pelestarian. Seperti dengan Siti Hinggil, pihak swasta yang diantaranya terdiri dari para pejabat tinggi negara ikut terlibat dalam pendirian beberapa bangunan dan pagar di sekitar makam. Dari kondisi tersebut dapat teridentifikasi bahwa kelompok kepentingan yang masih

terlibat dalam pemanfaatan Makam Putri Campa hingga saat ini adalah BPCB Trowulan, swasta, dan para peziarah.

3. Pembangunan Wihara Majapahit

Pengelola Wihara ini adalah Yayasan Lumbini, pendiriannya tidak dapat dilepaskan dari peran Banthe Viriyanadi. Ia adalah ketua Yayasan Lumbini wilayah Kabupaten Mojokerto. Lokasi wihara ini terletak di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan. Alasan berdirinya Wihara Majapahit di lokasi tersebut diawali ketika Banthe Viriyanadi bermeditasi di Siti Hinggil. Di tempat itu, Viriyanadi diberi petunjuk untuk berjalan ke arah selatan, dan ia pun menuruti dan menemukan lahan kosong di Desa Bejjong. Di atas lahan itu dipilih oleh Viriyanadi sebagai lokasi berdirinya sebuah Wihara. Ia lalu meminta persetujuan Janda Madres, pemilik lahan, setelah disetujui barulah pembangunan dilakukan. Sebagai banthe atau biksu asli dari Mojokerto, Banthe Viriyanadi paham betul sejarah Majapahit, situs-situs di Trowulan, hingga aspek keagamaan kerajaan Majapahit. Disinilah ikatan identitas Banthe Viriyanadi sebagai orang asli Trowulan dengan nilai-nilai Majapahit.



Sumber: Yayasan Lumbini, 1990

Gambar 19: Peresmian Wihara Majapahit oleh Gubernur Jawa Timur 31 Desember 1989

Awal pembangunan wihara berjalan lancar, terlebih karena Bupati Mojokerto saat itu, Koentoe Soetejo mendukung pembangunan Wihara Majapahit. Akan tetapi, ketika tiba saat peletakan batu pertama muncul hambatan karena ada pihak yang menentang pembangunan wihara. Wihara Majapahit yang rencananya dibangun berikut fasilitas Buddhist Center membuat Bhante Viriyanadi sempat diusut oleh Sospol hingga Komisi IX DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Edi Sud sebagai ketua komisi IX DPR RI.

Pembangunan wihara tersebut membuat Menteri Agama turun tangan dengan membentuk tim untuk mengusut pembangunan Wihara Mojopahit dan Buddhist Centernya, karena beranggapan bahwa izin pembangunan Buddhist Center hanya dapat dikeluarkan oleh pusat bukan daerah. Akhirnya dari Departemen Agama mengutus Direktur Agama Buddha saat itu untuk datang ke lokasi. Pertemuan dilaksanakan di Kabupaten bersama anggota Komisi IX DPR RI, dengan agenda mencari informasi tentang sejarah awal pendirian kepada Bhante Viriyanadi. Pada akhirnya, setelah terbukti tidak memiliki masalah dan dapat menunjukkan berkas-berkas yang dibutuhkan, pembangunan Wihara Majapahit dapat diteruskan.

Wihara Majapahit identik dengan patung Buddha tidurnya. Ukuran patung dengan panjang 22 meter, tinggi 4,5 meter, dan lebar enam meter, telah menjadikan daya tarik dan membuat kompleks wihara ini menjadi objek wisata. Bahkan menurut salah satu pengurus wihara, beberapa pengunjung tidak mengetahui kalau sebetulnya mereka datang ke tempat ibadah bukan tempat wisata.



Sumber: PMB LIPI, 2012

Gambar 20: Wihara Majapahit

Sumber: Puslitbangbud, 2012

Gambar 21: Patung Buddha Tidur

Masyarakat di sekitar lokasi wihara yang mayoritas beragama Islam, sampai saat ini tidak begitu mempersoalkan keberadaan Wihara tersebut. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi adalah lahan di depan Wihara Majapahit yang memang masih berada dibawah kepemilikan Yayasan Lumbini dijadikan sebagai tempat parkir oleh masyarakat. Jadi masyarakat diberikan sumber daya untuk dikelola, dengan tujuan tidak akan mengganggu keberadaan Wihara Majapahit. Banthe Viriyanadi juga dikenal sebagai orang yang pemurah dan baik oleh masyarakat karena suka memberi bantuan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

4. Pembangunan Pura Majapahit

Pendirian pura ini tidak dapat dilepaskan dari peran Hyang Suryo. Hyang Suryo adalah guru di Pura ini yang berasal dari Kediri. Ia mempercayai bahwa dirinya merupakan keturunan Raja Majapahit terakhir. Sehingga keyakinan yang diajarkan di pura ini adalah agama Majapahit. namun, pembangunan pura ini mendapat tentangan keras dari masyarakat. Kronologis kejadian diawali sekitar tahun 1997. Hyang Suryo membeli rumah dari warga setempat dan membangun pura di belakang rumah tersebut, sedangkan di depannya dibangun menara dan gapura. Pura Majapahit merupakan satu-satunya pura yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Keberadaan Pura Majapahit diprotes masyarakat sebanyak 2-3 kali. Protes pertama terjadi sekitar empat bulan setelah pembuatan pura, dimana kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang warga yang dipimpin oleh kyai-kyai di Trowulan menghendaki pembubaran Pura Majapahit. Sebagai catatan, banyak pondok-pondok pengajian di Trowulan, karena mayoritas masyarakat adalah Islam NU. Beberapa masalah diajukan oleh masyarakat ketika protes pertama berlangsung, diantaranya mengenai pemberian izin pembangunan pura dan mengenai orang-orang yang sembahyang di pura yang sebagian besar berasal dari luar Trowulan.



Sumber: *Majapahitabad21.wordpress.com*

Gambar 22: Pura Majapahit

Penolakan oleh masyarakat setempat yang dipimpin oleh tokoh agama didasari atas pendirian pura yang tidak sesuai dengan aturan hukum pendirian tempat ibadah. Di sekitar bangunan pura, hanya ada segelintir orang yang mempercayai ajaran Hyang Suryo dan kemudian dipekerjakan di pura tersebut. Mayoritas yang percaya dengan ajaran Hyang Suryo dan datang ke pura adalah orang-orang yang berasal dari luar Trowulan, seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta. Namun Hyang Suryo membela diri bahwa pura hanya digunakan oleh keluarga.

Setelah melalui perundingan sengit, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan yang didapat antara kedua belah pihak yaitu Pura

Majapahit tetap diperbolehkan berdiri asal jangan dibuka untuk umum. Keberadaan pura dapat diterima apabila tidak ada umat yang menggunakannya, terutama dari luar Trowulan. Apabila syarat ini tidak dilaksanakan oleh Hyang Suryo, maka pura akan dibongkar oleh masyarakat. Setelah itu, tidak ada pengunjung yang datang ke pura selama kurang lebih satu bulan. Namun secara garis besar, permasalahan belum selesai, karena setelah itu, perjanjian antara kedua belah pihak tidak tercapai dan pura kembali dibuka untuk umat sehingga muncul protes yang kedua.

Protes kedua berlangsung pada tahun 2001. Pada saat itu, warga yang memprotes sekitar 150 orang dan organisasi Banser ikut terlibat. Permasalahan yang dibawa oleh masyarakat sama dengan protes yang pertama. Jarak yang cukup lama antara protes yang pertama dan kedua disebabkan aparat desa mengatakan bahwa Hyang Suryo masih mengurus izin pendirian pura untuk umum. Setelah izin dikeluarkan dari Bupati, masyarakat tetap menolak, karena pemerintah kabupaten tidak melihat kondisi di Trowulan dan tidak berdialog dengan masyarakat Trowulan dalam proses izin tersebut.

Sampai saat ini, pura masih berdiri walaupun sudah jarang pengunjung yang datang. Pura nampak sudah ditutup sebagai tempat ibadah umum, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang kemungkinan kerabat dari Hyang Suryo. Kondisi saat ini, Hyang Suryo memiliki sekitar 3 anak buah yang membantunya untuk mengurus Pura Majapahit.¹³ Menurut pembantunya, Hyang Suryo sangatlah sibuk

¹³Wawancara dengan Romo R. Sisworo Gautama pada tanggal 27 Juni 2012. Ia diberikan kepercayaan oleh Hyang Suryo untuk mengurus Pura Majapahit yang terletak di Trowulan. Romo berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau terlibat dalam kepengurusan sejak Pura Majapahit berdiri hingga saat ini. Selain itu, ada juga pegawai Hyang Suryo yang lain bernama Bapak Aam asal Surabaya, namun tergolong baru karena hanya satu tahun lebih bekerja dengan Hyang Suryo. Hyang Suryo sendiri sulit sekali ditemukan, beliau memiliki tempat tinggal tidak hanya di Trowulan, bahkan beliau lebih sering menetap di Bali. Di Bali, Hyang Suryo juga memiliki Pura Majapahit.

dengan kegiatannya, beliau dipanggil kemana-mana di setiap daerah di Indonesia untuk mengajarkan keyakinannya.¹⁴ Hyang Suryo menganggap bahwa apa yang dilakukannya bukanlah berdasarkan pada keyakinan satu agama saja, namun semua keyakinan dapat masuk ke dalam Pura Majapahit. Karena pura ini melambangkan kemajapahitan, simbol kebangsaan dan persatuan kesatuan diantara berbagai pemeluk agama dan keyakinan.

5. Pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM)

Pada awal tahun 2009, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) membangun PIM yang berlokasi di Trowulan, tepatnya di kompleks Museum Trowulan. Pembangunan tersebut mengundang polemik karena dianggap menyalahi kaidah pelestarian warisan budaya. Walaupun Kemenbudpar yang bertanggung jawab atas pembangunan itu membantah telah menyalahi kaidah pelestarian warisan budaya. Akan tetapi, pada kenyataannya muncul kerusakan situs akibat pendirian tiang penyangga pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar tersebut.

Pembangunan tersebut amat disayangkan karena nampaknya tidak dilakukan persiapan yang matang, seperti melalui penelitian atau kajian apakah sudah memenuhi syarat untuk didirikan bangunan di lokasi tersebut atau sebaliknya. Disinilah peran BPCB sebagai unit pelaksana teknis pemerintah pusat untuk merekomendasikan boleh tidaknya sekitar lahan di kompleks Museum Trowulan didirikan Pusat Informasi Majapahit.

Di tingkat pemerintah pusat sendiri terdapat instansi yang merekomendasikan untuk meninjau ulang pembangunan tersebut, seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan kebudayaan yang sebelumnya membuat kajian tentang upaya pelestarian warisan budaya di Trowulan dengan bekerjasama dengan Universitas Indonesia.

¹⁴Menurut Hyang Suryo, ditutupnya Pura Majapahit membawa hikmah tersendiri bagi dirinya. Dirinya kerap dipanggil ke luar daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri (Surat Kabar Warta Bali, 5 Februari 2003).

Namun, pada kenyataannya pembangunan tetap berlangsung. Media yang ikut mengulas jalannya pembangunan PIM mengekspos bahwa memang telah terjadi kerusakan struktur Majapahit akibat pendirian pondasi bangunan. Masalah lantas berkembang menjadi isu nasional, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini sempat diproses secara hukum.



Sumber: Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2008

Gambar 23: Sketsa Konsep PIM Tahap I



Sumber: Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2008

Gambar 24: Konsep Bangunan PIM Tahap I



Sumber: Prof. Mundardjito, 2009

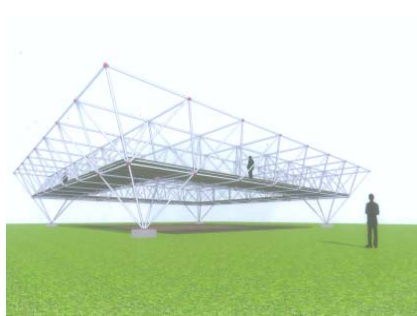
Gambar 25: Pembangunan Pondasi PIM Merusak Struktur Majapahit

Untuk mengatasi persoalan yang rumit tersebut, Kemenbudpar menempuh langkah untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dengan membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menbudpar Nomor: KM 01/OT.001/MKP/2009, pada 21 Januari 2009. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan evaluasi teknis arkeologis terhadap pembangunan Taman Majapahit yang sudah berjalan, menyusun konsep rencana pengembangan Taman Majapahit, dan menentukan langkah-langkah relokasi, rehabilitasi, dan rancang ulang pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan sesuai kaidah arkeologi.¹⁵

Di samping itu, tim menggelar sayembara arsitektur PIM yang meliputi sayembara masterplan dan sayembara bangunan museum terbuka. Sayembara ini diikuti lebih dari 100 arsitek dengan sertifikasi arsitek madya. Keluar sebagai pemenang sayembara masterplan adalah Ir. Adi Siswanto M.Arch dari Semarang sedangkan pemenang sayembara arsitektur bangunan adalah Ir. Yori Antar dari Jakarta.¹⁶ Dengan telah selesainya tugas Tim Evaluasi, Menbudpar kemudian membubarkan Tim Evaluasi 2009 dan segera membentuk lagi tim baru dengan tugas menindaklanjuti hasil kerja Tim Evaluasi 2009.

¹⁵Anggota tim terdiri dari: Drs. Wardiyatmo, M.Sc, Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM, Drs Suwandi (Pengarah); Drs. Hari Untoro Drajat, MA (Penanggung Jawab); Prof. Dr. Mundardjito (Ketua); Drs. Soeroso MP, M.Hum (Sekretaris); Dr. Daud Aris Tanudirjo, MA, Drs. Junus Satrio Atmojo, M.Hum, Rusli Yahya SH, Ir. Arya Abieta, Ir. Osrifoel Oesman, M.Hum, Ir. Bambang Eryudhawan, Drs. Gatot Gautama, MA, Drs. Sonny C. Wibisono DEA, dan Anam Anis, SH (Anggota).

¹⁶Pemenang sayembara ditetapkan oleh tujuh orang juri. Mereka adalah Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Slamet Wirasonjaya, arsitek Endy Subijono, budayawan Goenawan Mohamad, akademisi/arsitek Prof Josef Prijotomo, arkeolog Prof Mundardjito, ahli konservasi/arsitek Osrifoel Oesman, dan arsitek Suleman.



Sumber: BPCB Trowulan, 2010

Gambar 26: Konsep Bangunan PIM Tahap 2



Sumber: BPCB Trowulan, 2012

Gambar 27: Pembangunan PIM Tahap 2

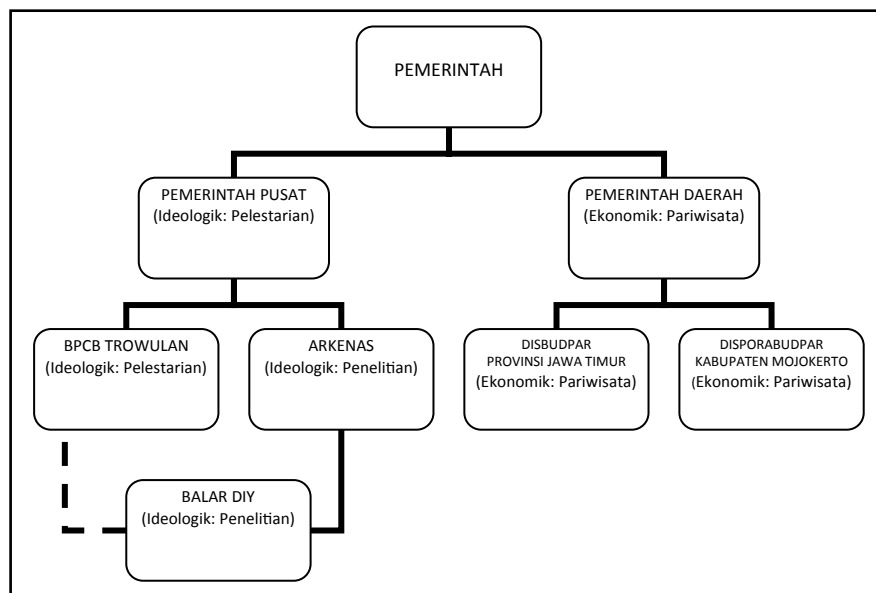
Sampai saat ini, pembangunan PIM tetap berjalan menggunakan rancangan yang dianggap lebih memperhatikan kaidah pelestarian warisan budaya. Namun sayangnya, kerusakan yang telah terjadi telah sedikit banyak menghilangkan “data” penting sebagai informasi keberadaan Majapahit. Peristiwa ini merupakan bentuk kurang sinergisnya hubungan antara *stakeholder* kebudayaan dengan *stakeholder* pariwisata di tingkat pemerintah pusat, padahal mereka masih dalam lingkup satu kementerian. Kondisi saat ini, kebudayaan dan pariwisata sudah menjadi bagian terpisah, kebudayaan kembali bergabung dengan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), sedangkan pariwisata bergabung dengan ekonomi kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kedua bidang tersebut ke depannya?

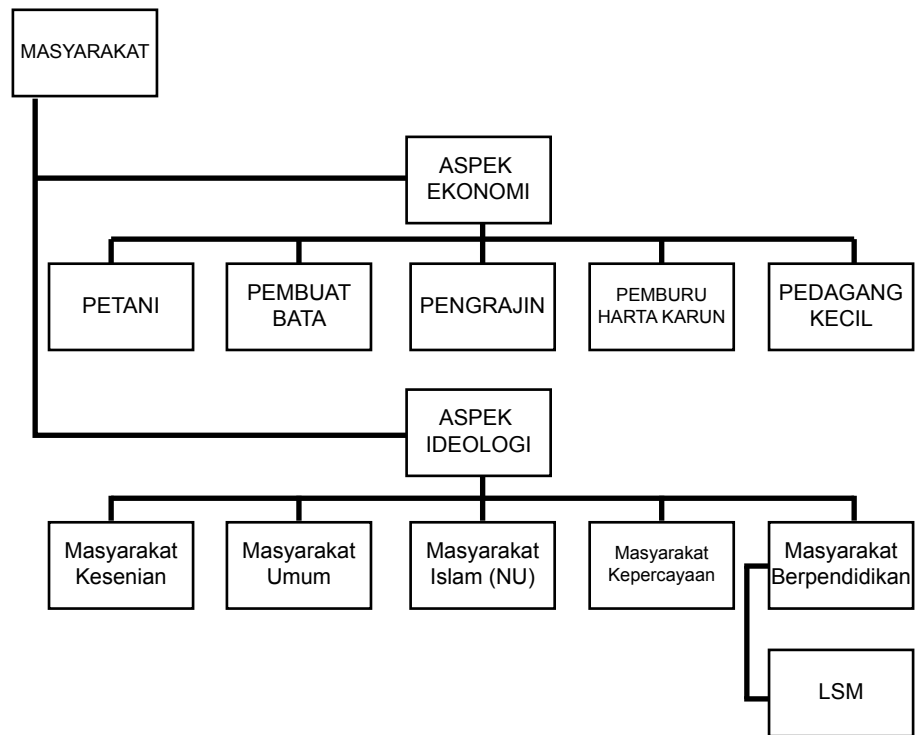
C. Kategori dan Hirarki *Stakeholder*

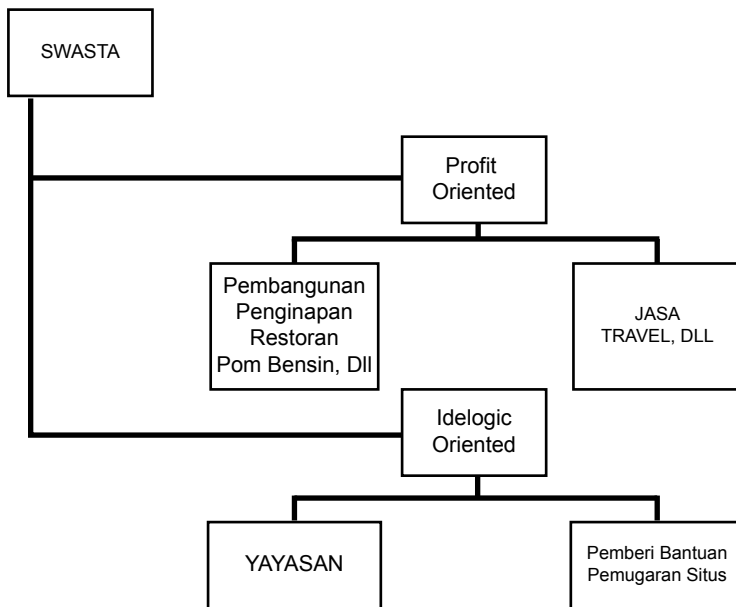
Banyaknya pihak yang teridentifikasi sebagai *stakeholder* dalam upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Trowulan menjadikan kawasan itu sebagai arena terbuka bagi siapa saja yang ingin masuk terlibat di dalamnya. Beberapa *stakeholder* memiliki persamaan kepentingan dan beberapa diantaranya memperlihatkan perbedaan yang bahkan meruncing pada pertentangan. Untuk itu, pada bagian ini akan

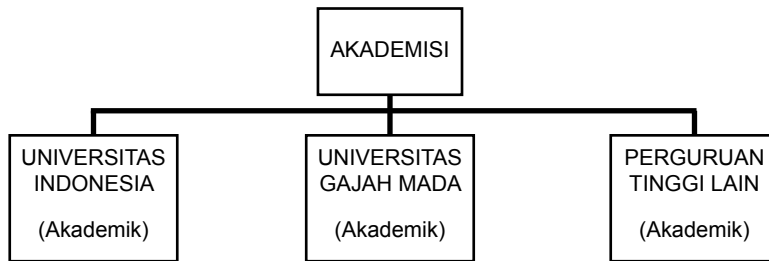
mengkategorikan *stakeholder* berdasarkan latar belakang dan kepentingan yang sama. Dalam setiap hubungan yang berlangsung, baik dalam bentuk pertentangan atau sebaliknya akan memperlihatkan pihak-pihak yang lebih dominan ketimbang pihak yang lain. Kondisi ini didasari atas perbedaan dan jumlah kapital yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*. Setiap kasus menampilkan pihak-pihak yang berbeda, merke yang dominan dalam satu kasus belum tentu menjadi yang paling berkuasa di kasus yang lain.

Kategori *Stakeholder* di Trowulan

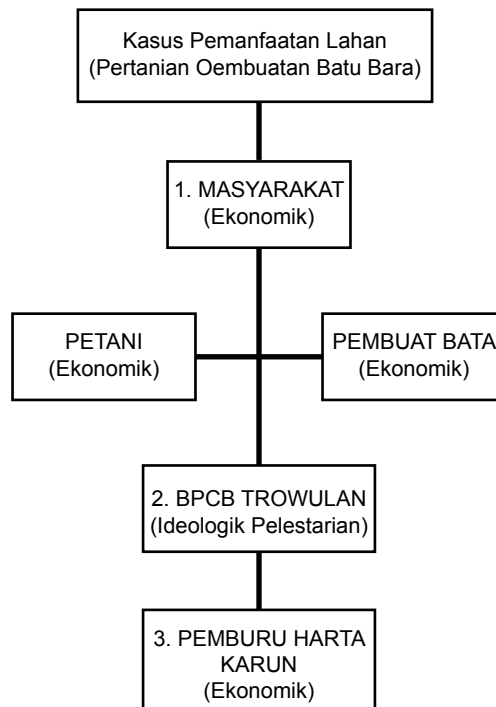


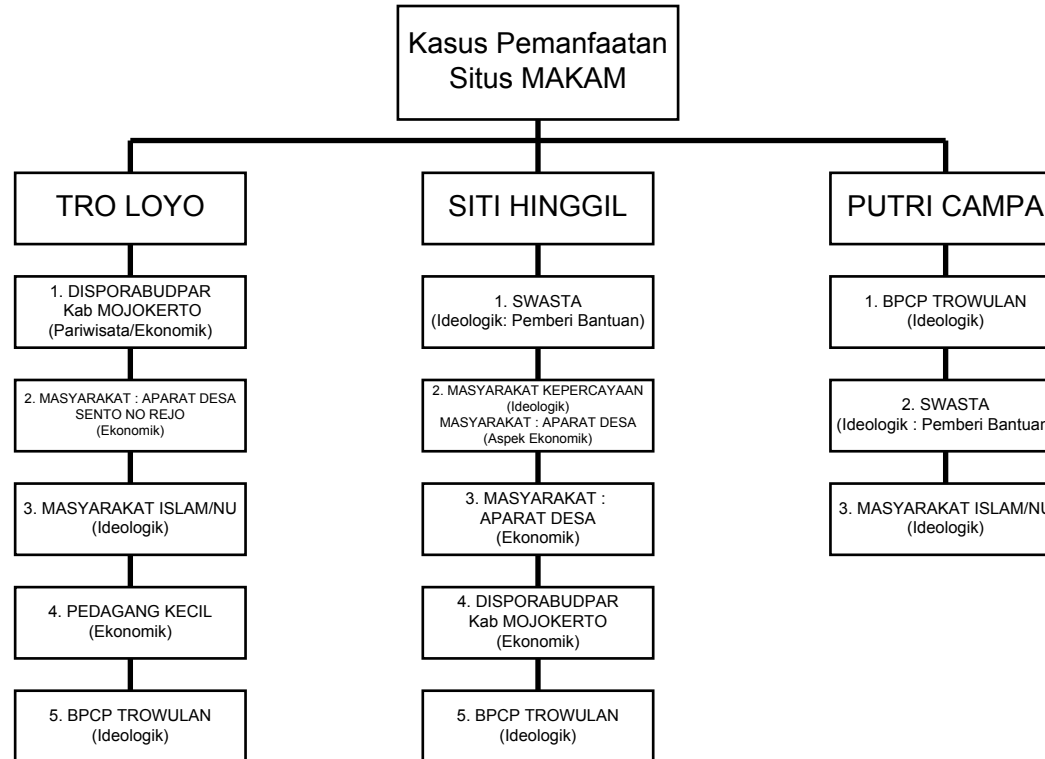


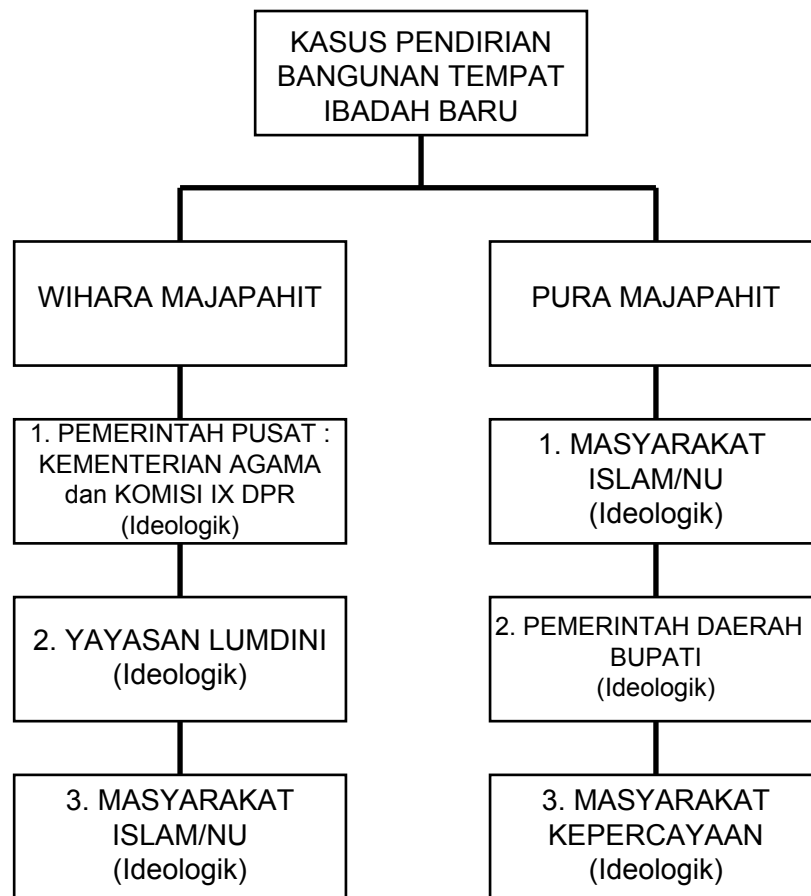




Hirarki Stakeholder dalam Kasus







BAB V

P E N U T U P

Dalam kasus pemanfaatan kawasan Trowulan, banyak sekali kelompok kepentingan baik yang lama atau baru yang terlibat di dalamnya. Melihat pada setiap kasus yang terjadi, tidak ada kekuasaan tunggal yang dimiliki oleh satu *stakeholder*, karena di setiap kasus menampilkan kelompok dominan yang berbeda. Setiap kelompok tersebut memiliki kepentingan berbeda-beda karena didukung oleh latar belakang budaya dan kapital yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan atau sebaliknya dapat menciptakan suatu kerjasama antar kelompok dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.

Trowulan kini menjadi ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam pelestarian dan pengelolaannya. Sayangnya, Trowulan juga belum menampilkan pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala upaya pelestarian dan pengelolaan di kawasan tersebut. Sampai saat ini terdapat empat kelompok yang lebih dominan daripada kelompok yang lain, *pertama* adalah pemerintah pusat, terutama BPCB Trowulan yang mewakili kepentingan pelestarian, *kedua* adalah pemerintah daerah terutama Disporabudpar Kabupaten Mojokerto yang mewakili kepentingan pariwisata, *ketiga* adalah masyarakat yang terbagi menjadi dua, pertama mewakili kepentingan ekonomi dan kedua mewakili kepentingan ideologi (pelestarian), *keempat* adalah swasta yang terbagi menjadi dua, pertama mewakili kepentingan ekonomi (dunia usaha) dan kedua mewakili kepentingan ideologi.

Pada dasarnya masih banyak *stakeholder* lain yang telah terlibat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Pada tingkat kementerian, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian lainnya. Begitu juga dengan LSM-LSM dan komunitas-komunitas yang makin banyak terlibat dalam upaya pelestarian

Trowulan. Bahkan, banyak sekali *stakeholder* yang bersifat individu telah melibatkan diri dalam pelestarian dan pengelolaan di Trowulan. Mencermati kondisi tersebut, kami hanya menampilkan sebagian besar *stakeholder* yang memiliki peran lebih besar. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu diperdalam lagi. Kami berharap ditahun berikutnya, dapat memetakan seluruh *stakeholder* yang berperan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Trowulan. Bagi kami yang terpenting adalah komitmen para *stakeholder* untuk duduk bersama-sama satu meja, menyamakan persepsi demi satu tujuan; pelestarian dan pengelolaan Trowulan yang bijak demi kepentingan identitas dan kebanggaan nasional, dan juga dapat mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Hedi Shri. 2004. *Warisan Budaya* dalam “Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya”, Arwan Tuti Artha. Yogyakarta: Kunci Ilmu,
- Badio, Sabjan. 2012. *Menelusuri Kesultanan di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- BP3 Trowulan. *Laporan Tentang Ambruknya Museum Purbakala di Trowulan*, lampiran dari Laporan Tahunan 1966-142/J.3/M/67-13-4-1967.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*. Jakarta: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Mojokerto. 2000. *Pengembangan Kawasan Pariwisata Majapahit Trowulan-Mojokerto*, dalam Rapat Evaluasi Hasil Pemugaran Bekas Kota Kerajaan Majapahit, Jombang, 25-26 Februari 2000.
- Fielden, Bernard M dan Jukka Jokilehto. 1998. *Management Guides for World Cultural Heritage Site*. Rome: ICCROM.
- Haryatmoko. 2010. *Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan: Teori Strukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya*, dalam Makalah Pasca Sarjana FIB UI.
- Hayari. *Sejarah Kepemilikan Tanah Perorangan Sebelum dan Sesudah UUPA 1960*, dalam SELAMI IPS Edisi Nomor 19 Volume 1 Tahun XI Desember 2006.
- IFSA. 1995. *Laporan Penelitian Arkeologi Situs Kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur 1991 – 1993*.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Cagar Budaya*.
- Mengenal Lebih Dekat Brahmaraja Wilatikta XI: Sang Dewa Ngejawantah*. Posmo Edisi 638, 2011.
- Muljana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKIS.
- , 2005. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Yogyakarta: LKIS.
- Muslich, Hanief. 2001. *Ziarah Kubur "Wisata Spiritual"*. Jakarta: Al-Mawardi-Prima.
- Nurbaiti, Siti. *Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Terhadap Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Purbakala*, dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 2, 1996.
- Pemerintah Kabupaten Dati II Mojokerto. 1992. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mojokerto*.
- Perkasa, Adrian. 2011. *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Puslitbang Kebudayaan. 2008. *Kajian Integratif Pelindungan dan Pengembangan "Situs Kerajaan Majapahit" di Trowulan*, Jakarta.
- Rahardjo, Supratikno dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Rahardjo, Supratikno. 2007. *Kota-Kota Prakolonial Indonesia: Pertumbuhan dan Keruntuhan*. Depok: FIB UI.
- Ricklefs, M. 2002. *A History of Modern Indonesia*. Stanford University Press.

- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Santiko, Hariani. *Dinamika Masyarakat Masa Majapahit dan Dampaknya Pada Kehidupan Beragama: Sebuah Studi Kasus*, dalam Pertemuan Ilmiah Arkelogi VII Jilid 2, 1996.
- Samuel, Hanneman. *Genealogi Kekuasaan, Ilmu Sosial Indonesia: dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Depok: Kepik Ungu, 2010, hlm. 12.
- Santosa, Imam Budhi. 2012. *Spiritualisme Jawa: Sejarah, Laku, dan Instisari Ajaran*. Yogyakarta: Melayu Publishing.
- Soedjono, Tjokro. *Hubungan Peninggalan Purbakala Dengan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Mojokerto*, dalam Buletin Arkeologi Desawrnana No. 02 Juni 2005.
- Swantoro, P. 2002. *Dari buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Gramedia, hlm. 165-171.
- Tanudirjo, Daud A. *Dari Abdi Negara Menjadi Abdi Masyarakat: Masa Depan Pengelola Sumberdaya Arkeologi di Indonesia*.
- Triharyantoro, Edi dan Winston S.D. Mambo. *Bata Pada Masa Kejayaan Majapahit*, dalam Proceedings Simposium 700 tahun Majapahit: Berdiri dan Kejayaannya. 1993. Depdikbud dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Universitas Gadjah Mada dan Bapeprop Jawa Timur. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Majapahit sebagai Pusat Budaya dan Pariwisata di Jawa Timur*. Yogyakarta.
- Yayasan Lumbini. 1990. *Buku Kenang-kenangan Peringatan HUT Ke-1 Buddhist Centre Maha Vihara Majapahit*. Trowulan-Mojokerto.
- , 2009. *Lukisan Perjalanan Sang Guru: Y.A. Mahathera Viriyanadi*. Trowulan-Mojokerto.